

**STRATEGI PARTAI BARU LOLOS VERIFIKASI PARTAI
PESERTA PEMILU 2024
(Studi Kasus Partai Gelora Kabupaten Sampang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Program Studi Pemikiran Politik Islam



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh :

FATHUR RAHMAN SODIK

E04219005

**PROGRAM STUDI PEMIKIRAN POLTIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fathur Rahman Sodik

NIM : E04219005

Fakultas/Prodi : Ushuluddin dan Filsafat/Pemikiran Politik Islam

Judul : Strategi Partai Baru Lolos Verifikasi Peserta Pemilu 2024 (Studi Kasus Partai Gelora Kabupaten Sampang)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila skripsi ini di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, peneliti bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 10 April 2023

Yang menyatakan,

Fathur Rahman Sodik
E04219005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Strategi Partai Baru Lolos Verifikasi Peserta Pemilu 2024 (Studi Kasus Partai Gelora Kabupaten Sampang)” yang ditulis oleh Fathur Rahman Sodik untuk diajukan sidang skripsi.

Surabaya, 9 April 2023

Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Andi Suwarko', with a large, stylized flourish above the name.

Dr. H. Andi Suwarko, S.Ag., M.Si.

NIP. 197411102003121004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Strategi Partai Baru Lolos Verifikasi Peserta Pemilu 2024 (Studi Kasus Partai Gelora Kabupaten Sampang)” yang ditulis oleh Fathur Rahman Sodik telah diuji di depan tim penguji pada tanggal 17 April 2023

Tim Penguji:

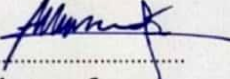
Dr. H. Andi Suwarko, S.Ag., M.Si

: 

Dr. Khoirul Yahya, S.Ag., M.Si

: 

M. Anas Fakhruddin, S. Th. I., M.Si

: 

Hasan Mahfudh, M. Hum

: 

Surabaya, 17 April 2023

Dekan,




Prof. Abdul Kadir Rivadi, Ph.D

197008132005011003



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fathur Rahman Sodik
NIM : E04219005
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Pemikiran Politik Islam
E-mail address : fathurrahman180799@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

STRATEGI PARTAI BARU LOLOS VERIFIKASI PESERTA PEMILU 2024 (Studi Kasus
Partai Gelora Kabupaten Sampang)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 3 Mei 2023

Penulis

Fathur Rahman Sodik

ABSTRAK

Fathur Rahman Sodik, 2023, Strategi Partai Baru Lolos Verifikasi Peserta Pemilu 2024 (Studi Kasus Partai Gelora Kabupaten Sampang). Skripsi Program Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Penelitian ini berawal dari ketertarikan peneliti melihat partai Gelora Kabupaten Sampang lolos menjadi peserta pemilu 2024. Selain itu partai gelora merupakan partai baru. rumusan masalah dari peneliti ini adalah Bagaimana Strategi Partai Gelora Kabupaten Sampang lolos verifikasi peserta pemilu 2024 dan faktor yang menghambat dan mendukung Partai Gelora kabupaten Sampang lolos verifikasi peserta pemilu 2024. Untuk menjawab permasalahan ini, peneliti menggunakan teori peter schroder dan teori partai politik dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu strategi yang telah di gunakan oleh Partai Gelora Kabupaten Sampang lolos verifikasi peserta pemilu 2024. Strategi lolos verifikasi Partai Gelora Kabupaten Sampang meliputi: strategi lolos verifikasi pengurus Partai Gelora, Strategi lolos verifikasi anggota Partai Gelora dan strategi lolos verifikasi sekretariat Partai Gelora. strategi lolos verifikasi pengurus Partai Gelora Kabupaten Sampang meliputi: strategi rekrutmen berbasis organisasi, persamaan visi –misi program perjuangan dan pertemanan. Strategi lolos verifikasi anggota Partai Gelora Kabupaten Sampang, strategi ofensif meliputi: strategi gelya sunyi dan strategi media sosial, strategi defensif meliputi: strategi komunikasi tatap muka (*Face to Face*). Strategi lolos verifikasi sekretariat dengan mempertimbangkan tingkat kepadatan penduduk, kedekatan jalan raya, kedekatan area perkantoran, keamanan lokasi, infastruktur serta saran dan prasana. Adapun faktor pendukung bagi Partai Gelora Kabupaten Sampang adanya keterlibatan tokoh masyarakat dan pembentukan tim lapangan. Untuk faktor penghambat bagi Partai Gelora Kabupaten Sampang yaitu dalam komunikasi, terkait pendanaan serta pemilihan sekretariat.

Kata Kunci : Strategi, Partai Baru Gelora, Lolos Verifikasi.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitan.....	10
E. Definisi Konseptual.....	11
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI.....	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Landasan Teori.....	37
1. Strategi Politik.....	37
2.Partai Politik.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Metode Penelitian.....	48
1.Jenis Penelitian.....	48
2.Lokasi Penelitian	49
3.Informan Penelitian	49
4.Teknik Pengumpulan Data.....	51

5. Teknik Analisis Data	53
6. Tehnik Pemeriksaan Keabsahan Data	55
7. Jadwal Penelitian.....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN	58
A. Deskripsi Partai Gelora Sampang	58
1. Sejarah	58
2. Visi Misi, Tujuan dan Program.....	59
3. Asas dan Jadi diri	61
4. Susunan Pengurus	63
B. Konfigurasi Politik Lokal	63
1. Hasil Pileg 2019	63
2. Hasil Pilkada 2018	67
C. Strategi Partai Gelora Lolos Verifikasi Peserta Pemilu 2024.....	69
1. Strategi Rekrutmen Pengurus DPD & DPC Partai Gelora Kabupaten Sampang	72
a. Strategi Rekrutmen berbasis Jaringan Organisasi	76
b. Strategi Rekrutmen berbasis kesamaan visi, misi, program perjuangan	81
c. Strategi Rekrutmen berbasis Pertemanan	85
2. Strategi Rekrutmen Anggota DPD Partai Gelora Kabupaten Sampang	94
a. Strategi Ofensif (Menambah).....	94
b. Strategi Defensif (Merawat)	110
3. Strategi Pengadaan Sekretariat DPD Partai Gelora Kabupaten Sampang	115
a. Kriteria pemilihan Sekretariat DPD Partai Gelora Kabupaten Sampang	116
b. Sarana dan Prasarana Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Gelora Kabupaten Sampang.....	119
c. Strategi-strategi dalam pemilihan lokasi sekretariat DPD Partai Gelora Kabupaten Sampang.....	120

d.Sumber Dana.....	123
4.Strategi Komunikasi Politik dengan Penyelenggara Pemilu	123
D. Faktor yang penghambat dan pendukung partai Gelora Kabupaten Sampang lolos verifikasi peserta pemilu 2024	125
1.Faktor Penghambat.....	125
2.Faktor Pendukung	130
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	133
A.Kesimpulan	133
B.Saran	134
DAFTAR PUSTAKA	135
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Partai Politik Di Verifikasi Secara Faktual Oleh KPU.....	5
Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian.....	50
Tabel 3. 1 Waktu Pelaksanaan Penelitian.....	57
Tabel 4.1 Susunan Dewan Pengurus Daerah Partai Gelora Indonesia KabupatenSampang Periode 2019 – 2024.....	63
Tabel 4.2 Perolehan kursi partai politik di DPRD Sampang Pemilu 2019-2024.....	64
Tabel 4.3 Perolehan suara kandidat dalam pilkada Sampang tahun 2018.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Skema Strategi Rekrutmen berbasis jaringan organisasi.....	79
Gambar 4.2 Skema Strategi Rekrutmen Berbasis Pertemanan.....	89
Gambar 4.3 Skema Strategi Rekrutmen Pengurus DPD & DPC Partai Gelora Kabupaten Sampang.....	90
Gambar 4.4 Situs website Partai Gelora dalam rekrutmen anggota partai politik.....	105
Gambar 4.5 Media sosia facebook Partai Gelora Kabupaten Sampang dalam Rekrutmen anggota.....	106
Gambar 4.6 Media sosal Instagram Partai Gelora Kabupaten Sampang dalam Rekrutmen anggota.....	108
Gambar 4.7 Strategi Rekrutmen Anggota DPD Partai Gelora Kabupaten Sampang.....	115
Gambar 4.8 Sekretariat Partai Gelora Kabupaten Sampang.....	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia sudah banyak menganut berbagai sistem pemerintahan, hingga pada akhirnya pada tahun 1998 era reformasi sampai dengan saat ini Indonesia memilih sistem pemerintahan demokrasi, yaitu sistem demokrasi pancasila dengan pancasila sebagai sebuah ideologi dan acuannya untuk mengatur dan mengelola kehidupan bernegaranya. Walaupun belum sepenuhnya sistem ini berjalan dengan baik akan tetapi Indonesia sudah mampu memberikan ruang kebebasan masyarakat untuk menyatakan aspirasi.

Partai Politik dalam sistem demokrasi di Indonesia memiliki posisi sentral dan memiliki peran yang sangat penting semua proses politik, dari pemilihan calon legislatif, kepala daerah, presiden. Selain memiliki peran penting, partai politik juga memiliki fungsi diantaranya: artikulasi dan agregasi kepentingan, pendidikan politik, kaderisasi, dan rekrutmen. Fungsi yang satu dengan fungsi yang lainnya memiliki hubungan, dan memiliki pengaruh terhadap pemikiran dan antusias anggota atau masyarakat umum terhadap suatu partai politik.¹

Partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilu dan melalui pemilu itu mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Ramlan Surbakti menyebutkan salah satu fungsi utama partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna

¹ Efriza, Nfn. "Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik [The Existence Of The Political Parties In Public Perception]." *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* Vol.10, No. 1, 2019, 217.

mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem politik demokrasi dalam kaitannya mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilu.

Undang- Undang Nomor. 2 tahun 2008 tentang partai politik, pasal 1 ayat (1) melaporkan Partai Politik merupakan organisasi yang bertabiat nasional serta dibangun oleh sekelompok masyarakat negeri Indonesia secara sukarela atas bawah kesamaan kehendak serta cita- cita buat memperjuangkan serta membela kepentingan politik anggota, warga, bangsa serta negeri, dan memelihara keutuhan Negeri Kesatuan Republik Indonesia bersumber pada Pancasila serta Undang- Undang Bawah Negeri Republik Indonesia Tahun 1945.

Tujuan dari berdirinya partai politik di Indonesia merupakan salah satunya turut dalam pemilihan universal. partai politik yang kan menjajaki suatu pemilihan universal wajib melewati sebagian tahapan registrasi serta verifikasi pemilu tahapan ini ialah tahapan yang krusial dalam siklus pemilihan universal. disebabkan lolos tidaknya suatu partisipan pemilu di tentukan oleh hasil dari verifikasi yang dicoba oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Partai politik tidak serta-merta dapat mengikuti kontestasi pemilu meskipun mereka sudah berbadan hukum. Sebelumnya, partai politik harus melewati sebuah tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Tahapan

ini merupakan salah satu tahapan yang krusial dalam siklus pemilu. Sebab, lolos tidaknya menjadi peserta pemilu ditentukan oleh hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU.

Verifikasi ialah proses pengecekan yang terpaut dengan keterpenuhan ketentuan suatu partai politik buat menjajaki pemilu. Aktivitas ini merupakan upaya buat meyakinkan kebenaran serta keterpenuhan bermacam ketentuan dalam kepesertaan pada pemilu. Proses tersebut dimaksudkan buat mendesak partai politik meyakinkan kemampuannya jadi partisipan pemilu.²

Ketentuan menimpa registrasi partisipan pemilu diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Universal (PKPU) No 4 tahun 2022. Peraturan tersebut mengendalikan tentang syarat- syarat registrasi serta verifikasi partai politik partisipan Pemilu 2024. Bersumber pada PKPU Nomor. 4 tersebut, tiap Partai Politik (Parpol) partisipan Pemilu 2024 harus penuhi paling tidak 10 ketentuan yang telah diatur, ialah berstatus tubuh hukum cocok dengan UU Parpol; mempunyai kepengurusan di segala provinsi; mempunyai kepengurusan sangat sedikit 75 persen dari jumlah kabupaten/ kota di provinsi yang bersangkutan.

Tidak hanya itu, tiap partai politik selaku partisipan yang hendak menjajaki pemilu wajib mempunyai kepengurusan sangat sedikit di 50 persen jumlah kecamatan; menyertakan sangat sedikit 30 persen keterwakilan wanita

² Indra Madan Putra, Ria Ariany, Syahrizal, Tata Kelola Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Komisi Pemilihan Umum kota Padang. *JISPO*, Vol. 9 No. 1, 2019, hal.109.

pada kepengurusan parpol tingkatan pusat; mempunyai anggota sangat sedikit 1.000 ataupun 1/1.000 dari jumlah penduduk; mempunyai kantor senantiasa buat kepengurusan pada tingkatan pusat provinsi hingga kota; mengajukan nama; lambang; dan tanda Parpol ke KPU; menyerahkan nomor rekening atas nama partai.

Adapun Proses Verifikasi KPU parpol lama berbeda dengan proses verifikasi parpol baru. Dengan parpol lama, verifikasi itu tidak nyata, melainkan verifikasi administratif. Partai politik yang lolos atau mengikuti Pemilu 2024 hanya sebatas verifikasi administratif, bukan verifikasi sebenarnya yang diatur dalam Pasal 173 (3) UU Pemilu.

Untuk dapat terpilih sebagai calon, setiap calon dari partai peserta pemilu harus memenuhi syarat pendaftaran. Dari kelengkapan persyaratan pendaftaran yang dipenuhi partai, pihak terkait dapat mengikuti tahap verifikasi administrasi dan kemudian verifikasi faktual dari KPU.

Pendaftaran dan verifikasi parpol harus mengikuti ketentuan yang berlaku, masing-masing parpol wajib menyerahkan kelengkapan parpol, pendaftaran dilakukan di pusat, yaitu di tingkat pusat partai KPU RI, sedangkan di tingkat daerah. pengurus partai menyerahkan daftar anggota yang dilampirkan pada Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk. Tanda Penduduk (KTP) Elektronik/Surat Keterangan (Suket) KPU Kabupaten/Kota. Verifikasi dilakukan dengan mengirimkan petugas ke daerah. Selama verifikasi, petugas akan mengecek kebenaran lokasi kantor,

jumlah anggota dan status kader semua pihak. Saat memverifikasi, petugas berhati-hati untuk menunjukkan lokasi persis kantor Partai Politik di daerah.

Partai Politik yang diverifikasi Oleh KPU Kabupaten Sampang

Tabel 1. 2

Daftar Partai Politik Di Verifikasi Secara Faktual Oleh KPU

NO.	Partai Politik
1	Partai Bulan Bintang
2	Partai Buruh
3	Partai Garda Perubahan Indonesia
4	Partai Gelombang Rakyat Indonesia
5	Partai Hati Nurani Rakyat
6	Partai Kebangkitan Nusantara
7	Partai Pelindo
8	Partai Solidaritas Indonesia
9	Partai Ummat

Sumber : <https://www.kpu.go.id>

Pentingnya Verifikasi Faktual kepengurusan yang dilakukan meliputi keabsahan dokumen kepengurusan Parpol, keberadaan alamat kantor sekretariat parpol serta keterwakilan 30% persen perempuan dalam kepengurusan Parpol. Sementara Verifikasi Faktual keanggotaan Parpol dilakukan dengan mencocokkan Kartu Tanda Anggota serta KTP yang bersangkutan dengan data anggota Parpol.

Kehadiran Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) di kancah politik nasional patut diperhatikan karena melahirkan politisi berpengalaman

yang merupakan mantan kader PKS. Diumumkan pada 10 November 2019 dan disahkan dengan SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 19 Mei 2020, Partai Gelora dipimpin oleh Anis Matta sebagai Ketua Umum, Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua Umum dan Mahfuz Sidik sebagai Sekretaris Jenderal.

Alasan pendirian Partai Gelora adalah untuk menolak semua dikotomi menyesatkan yang muncul dari masa lalu, antara Islam dan nasionalisme. Dikotomi yang tidak berdasar ini harus dihilangkan karena Islam tidak ingin disebut non-nasionalis dan nasionalis tidak ingin disebut Islam atau tidak bertuhan. Inilah sebabnya mengapa ada pembangunan nasional yang dapat menyatukan pandangan tersebut dan pihak Gelora hadir untuk menjawab semua kecurigaan dan kebuntuan yang menyebabkan kurangnya kepercayaan sebagai sebuah bangsa. Sebagai partai baru yang belum dikenal masyarakat luas, partai ini berusaha mendapatkan kepercayaan publik sekaligus legitimasi politik.³

Dunia politik yang kaku menuntut parpol mengembangkan identitas yang membedakannya dengan parpol lain. Dengan terciptanya identitas ini, parpol lebih dikenal masyarakat dan perlu dibedakan antara parpol. Karena itu, Partai Gelora perlu menerapkan strateginya untuk meraih dukungan publik dan juga lolos Verifikasi peserta Pemilu serentak pada tahun 2024.

³ Maulida Rita Widyana, Strategi Partai Gelora sebagai Partai Baru Menuju Pemilu 2024 Untuk Memenuhi Parliamentary Threshold, *Jurnal PolGov*, Vol. 4 No. 1, 2022, hal. 129.

Proses pada berdirinya sebuah partai diawali pada pertemuan Gerakan arah Baru Indonesia (GARBI) Madura Raya di Kabupaten Pamekasan pada 23 Februari 2019 dan pada waktu itu yang bernama Sahrul Mukarom menghadiri dari perwakilan Kabupaten Sampang. setelah pertemuan tersebut Inisiatif dari salah satu anggota Garbi untuk membentuk sebuah partai politik yang bernama Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) konsolidasi awal proses di Jawa Timur Surabaya pada 2 November 2019 untuk membahas persiapan membentuk sebuah partai.

Dengan hadirnya Partai Gelora Kabupaten Sampang pada 10 November 2019 yang di pimpin Sahrul Mukarrom sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Gelora Kabupaten Sampang dengan berjalanya waktu pengurus DPD telah mempunyai Sekretariat di jalan Rajawali No, 13 dan seiring berjalannya waktu pengurus DPD Partai Gelora Sampang tersebut membentuk Dewan Pengurus Kecamatan (DPC) dengan jumlah 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang dan pengurus anak cabang (PAC) untuk sementara masih terbentuk 10 Desa dengan jumlah 6 Lurah 180 Desa dengan jumlah anggota yang sudah terdaftar di sipol 1113 hingga saat ini.

Alasan mengapa peneliti memilih Partai Gelora Kabupaten Sampang karena Partai baru ini tersebut mempunyai dampak yang sangat positif pada masyarakat bawah dan menengah salah satunya adalah bentuk kepedulian, selain itu masyarakat Sampang diketahui notabelnya masyarakat religius atau bisa ketehui bahwa masyarakat pada dasarnya masih terpeka dengan suatu

identitas. Namun kehadirannya Partai Gelora merupakan suatu jawaban yang di nanti-nanti oleh masyarakat kerana Partai Gelora mengarah kepada sistem Kepartaian yang bersifat religius, Nasionalis dan Kompetitif.

Selain itu Partai Gelora adalah Partai Politik yang sudah siap untuk mengikuti jelang pemilu 2024 yang akan mendatang pada kelulusan Verifikasi menjadi Partai Baru merupakan suatu kesiapan yang di miliki oleh Partai Gelora, berbeda dengan Partai Baru yang lain seperti Partai Ummat, Partai Gelora sudah mendapatkan SK Kemenkumham dan bertemu dengan para petinggi Partai dan Presiden.

Banyak Penelitian tentang Fenomena kemunculan Partai Baru dengan berbagai fokus dan perspektif berbeda yakni membahas kemunculan partai politik baru pada pemilu 2019 sebagai alternatif pilihan politik dari partai lama yang sudah ada partai baru bisa mendapatkan simpati dari pemilih yang menginginkan suatu yang baru di partainya dan tantangan yang di hadapi Partai Baru adalah kepemimpinan, yakni minimnya figur populer dan kuat yang memiliki basis akar rumput pada proses pendaftaran verifikasi Administrasi dan Faktual ada beberapa Partai Baru yaitu Partai Gelora, Partai Ummat, Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara.

Peneliti berasumsi apabila Strategi Partai Baru pada verifikasi tidak optimal maka akan berakibat ketidak lolosnya terhadap Proses verifikasi sehingga penelitian ini, peneliti hendak memiliki Strategi Partai Baru terkait proses verifikasi Partai Politik. Hal sangat penting karena proses verifikasi

merupakan gerbang partai politik untuk dapat menjadi peserta pemilu atau tidak dan tentunya proses verifikasi atau kelolosan dan faktor hambatan serta faktor pendukung.

Oleh karena itu peneliti untuk mempertanyakan bagaimana Proses Verifikasi terhadap partai baru sebagai Peserta Pemilu 2024 tersebut. oleh karena itu strategi apa yang di lakukan DPD Gelora Kabupaten Sampang sehingga bisa lolos Verifikasi yang baik sangat penting dalam mempertanyaan ini. pemilu akan terwujud melalui verifikasi pendaftaran peserta pemilu yang mengikuti prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, agar lebih fokusnya penelitian ini maka peneliti sengaja menetapkan fokus penelitian pada DPD Gelora Kabupaten Sampang, disamping alasan karena partai politik baru ini sangat minim pastinya dalam kepengurusan apalagi tingkat daerah khususnya Kabupaten Sampang di partai baru. Dalam strategi yang dilakukan untuk mempersiapkan pemilu 2024 DPD Partai Gelora Kabupaten Sampang hanya dilakukan di daerah Kabupaten Sampang dengan jumlah 14 kecamatan.

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk peneliti mengambil judul **“STRATEGI PARTAI BARU LOLOS VERIFIKASI PARTAI PESERTA PEMILU 2024 (Studi Kasus Partai Gelora Kabupaten Sampang)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Strategi Partai Gelora Kabupaten Sampang lolos Verifikasi peserta pemilu 2024?
2. Apakah faktor yang menghambat dan mendukung Partai Gelora kabupaten Sampang lolos Verifikasi peserta pemilu 2024 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Strategi Partai Gelora Kabupaten Sampang lolos Verifikasi peserta pemilu 2024.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat dan mendukung Partai Gelora Kabupaten Sampang Lolos Verifikasi peserta pemilu 2024.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai metode perbandingan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia, dan juga diharapkan dapat memperluas pengetahuan ilmiah di bidang kebijakan dan memberikan wawasan tentang strategi kebijakan untuk mempersiapkan partai politik atau persiapan pemilihan parlemen.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Fakultas dan Program Studi

Penelitian ini dijadikan sebagai bahan ilmiah untuk referensi serta sebagai bahan penunjang untuk kebutuhan lingkungan kampus khususnya Program Studi Pemikiran Politik Islam. Dimana kajian

dunia politik sangat bermanfaat dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembelajaran mahasiswa.

b. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk mengungkapkan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan, mendiskusikan teori-teori yang tersedia untuk mendukung penelitian, dan menjelaskan keadaan proses strategi Partai Politik.

E. Definisi Konseptual

1. Strategi

Menurut Firmanzah, strategi adalah rencana kegiatan yang cermat untuk mencapai tujuan tertentu dan dikaitkan dalam hal waktu dan ruang lingkup. Oleh karena itu, strategi di sini adalah menggunakan dan mengembangkan kekuatan (baik ideologis, politik, sosial, budaya atau hukum) melalui seni dan ilmu pengetahuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁴

2. Partai Politik Baru

Partai Politik Baru yang akan muncul pada pemilihan umum 2024 mendatang pada dasarnya sesuai karakteristik masyarakat Indonesia, karena pada umumnya masyarakat Indonesia yang sangat beragam, terdiri dari berbagai jenis latar belakang baik bahasa, suku, agama, adat istiadat. Keberagaman masyarakat Indonesia menjadi salah satu sebab utama keinginan melakukan penyerdahanan jumlah partai politik.

⁴ Firmanzah, *Mengelola Partai Politik-Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum. 2008), 255.

Melihat stuktur masyarakat Indonesia yang tidak memiliki kesamaan mendasar antara masing-masing kelompok, artinya masyarakat memiliki karakteristik yang berbeda-beda.⁵

3. Pemilu

Bedasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan penyelenggaraan pemilihan serentak baik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilu presiden dan wakil presiden, Pasal 2 menyatakan bahwa pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilihan umum adalah langsung, umum, bebas, rahasia, setia, dan adil dalam negara kesatuan. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Verifikasi

Verifikasi merupakan proses pemeriksaan yang terkait dengan keterpenuhan syarat sebuah partai politik untuk mengikuti pemilu. Kegiatan ini adalah upaya untuk membuktikan kebenaran dan keterpenuhan berbagai syarat dalam kepesertaan pada pemilu. Proses tersebut dimaksudkan untuk mendorong partai politik membuktikan kemampuannya menjadi peserta pemilu.⁶

⁵ Ramadhan, D.A, Menuju Penyerderhanaan Partai Politik di Indonesia serta Dampaknya Terhadap Persatuan Bangsa, *Jurnal Administrative Law & Governance* ,Vol.2 No. 1, 2019.

⁶ Indra Madan Putra, Ria Ariany, Syahrizal, Tata Kelola Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Komisi Pemilihan Umum kota Padang. *JISPO*, Vol. 9 No. 1, 2019, 109.

a. Verifikasi Admintrasi

Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, Verifikasi administrasi juga dilakukan terhadap dokumen-dokumen:

- 1) Berstatus badan hukum
- 2) Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi
- 3) Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota
- 4) Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota
- 5) Menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat
- 6) Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik dibuktikan dengan kepemilikan KTA
- 7) Mempunyai Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu
- 8) Menyampaikan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU
- 9) Menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.⁷

⁷ Pasal 7 Undang-Undang nomer 4 tahun 2022 tentang *Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah*.

b. Verifikasi Faktual

Verifikasi faktual ialah kepengurusan yang dilakukan meliputi keabsahan dokumen kepengurusan parpol, keberadaan alamat kantor sekretariat parpol serta keterwakilan 30% persen perempuan dalam kepengurusan parpol. Sementara verifikasi faktual keanggotaan parpol dilakukan dengan mencocokkan Kartu Tanda Anggota serta KTP yang bersangkutan dengan data anggota parpol.

F. Sistematika Pembahasan

Sebagai kerangka acuan dalam proses penelitian, dan untuk mempermudah dalam pembahasan dan untuk memahami isi dari penelitian maka untuk itu dibuatlah sistematika pembahasan dalam bentuk sebagaimana berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan garis besar pokok bab dalam penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konseptual dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN TEORITIK

Dalam bab ini akan membahas mengenai tinjauan penelitian terdahulu yang membahas terkait strategi beserta hasil penelitiannya dan membahas teori-teori dasar serta beberapa acuan teoritik atau kajian teori.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai jenis penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan juga teknik pemeriksaan keabsahan data. Selain itu, dijelaskan juga terkait lokasi penelitian, waktu penelitian, dan informan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan pada bab ini berisi tentang hasil penelitian yang didapat, selanjutnya data hasil temuan lapangan yang diperoleh dari penelitian akan

dianalisa menggunakan teori yang sesuai dan kemudian dikonfirmasi dalam bentuk hasil temuan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir dalam pembahasan ini adalah penutup yang berisi penarikan kesimpulan, saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Sehubungan dengan judul **Strategi Partai Baru lolos Verifikasi Partai peserta Pemilu 2024 (Studi Partai Gelora Kabupaten Sampang)** Proses awal sebelum melakukan penelitian memberikan penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan agar pada penulisan penelitian ini dapat dipastikan belum adanya penelitian yang serupa yang di tulis sebelumnya. Di sisi lain agar penelitian ini terhindar dari bentuk plagiat dan bentuk tindakan-tindakan lain yang dapat menyalahi keilmuan. Dari beberapa literasi yang ada penulis menemukan penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, Arsinaldi, dengan judul *Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Dan Penguatan Prinsip Tata Kelola Pemilu Yang Berintegritas*.⁸ Rumusan masalah yaitu bagaimana pentingnya verifikasi partai politik agar kualitas peserta Pemilu menjadi lebih baik dan Pemilu menjadi berintegritas. membahas pentingnya verifikasi partai politik agar kualitas peserta Pemilu menjadi lebih baik dan Pemilu menjadi berintegritas. Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan data sekunder dari berbagai hasil penelitian yang sudah dipublikasikan dalam jurnal, dokumen penelitian yang tidak dipublikasi seperti tesis dan disertasi serta laporan jurnalistik. Penelitian ini menemukan bahwa Verifikasi partai politik

⁸ Arsinaldi, "Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Dan Penguatan Prinsip Tata Kelola Pemilu Yang Berintegritas", *Journal.kpu.go.id*, 2019.

adalah keniscayaan agar dihasilkannya peserta pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Ada beberapa temuan dalam Jurnal ini sehingga setiap partai politik tanpa kecuali harus melakukan Verifikasi. Pertama, masih ada partai politik yang tidak memiliki syarat kepengurusan di 34 provinsi, 75 persen kepengurusan di kabupaten kota di provinsi dan 50 persen kepengurusan di tingkat kecamatan dalam provinsi tersebut. Kedua, masih ada partai politik yang tidak memiliki anggota yang mencapai 1000 orang atau 1/1000 jumlah penduduk. Ketiga, masih banyak partai politik yang tidak melaksanakan fungsinya dengan baik bahkan kantor kepengurusan permanen yang disyaratkan untuk menampung aspirasi masyarakat juga sering tutup tidak melakukan aktifitasnya. Keempat, ada fenomena yang menarik di daerah bahwa klientelisme politik masih dominan dalam Pemilu.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada rumusan masalah. Dalam Penelitian di atas lebih terfokus Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Dan Penguatan Prinsip Tata Kelola Pemilu Yang Berintegritas. sedangkan dalam penelitian ini peneliti lebih fokus bagaimana strategi partai baru lolos dalam verifikasi dan faktor hambatan dan dukungan.

Kedua, Maulida Rita Widyana dengan Judul Strategi Partai Gelora sebagai Partai Baru Menuju Pemilu 2024 untuk Memenuhi Parliamentary Threshold.⁹ Rumusan masalah mengkaji tentang strategi yang digunakan oleh partai baru, yaitu Partai Gelora dalam persiapan menuju pemilihan umum (pemilu) 2024 untuk memenuhi parliamentary threshold. Penelitian ini

⁹ Maulida Rita Widyana, "Strategi Partai Gelora sebagai Partai Baru Menuju Pemilu 2024 untuk Memenuhi Parliamentary Threshold", *Jurnal PolGov* Vol. 4 No. 1, 2022.

menggunakan teori Anthony Giddens mengenai struktur dan agency, yang mana penulis menjelaskan tentang hambatan dan pendorong Partai Gelora sebagai agency dalam menangani struktur yang ada. Penulis menempatkan tiga framework analisis, yaitu (1) analisis proyek politik, (2) sumber daya, dan (3) struktur peluang politik. Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data, yaitu data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan studi kepustakaan, yang berupa media online, buku, serta jurnal nasional maupun internasional yang relevan mengenai strategi Partai Gelora dalam mendapatkan basis masa untuk meraih kursi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai Gelora memiliki beberapa strategi yang digunakan menuju pemilu 2024. Partai Gelora harus dapat meyakinkan masyarakat apabila partai tersebut memang layak untuk dipilih dan memiliki pembaharuan dibandingkan dengan partai politik selama ini. Partai Gelora harus berjuang agar mencapai parliamentary threshold dan memiliki basis dukungan masa yang banyak dengan strategi-strategi kolektif.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak padamengkaji tentang strategi yang digunakan oleh partai baru, yaitu Partai Gelora dalam persiapan menuju pemilihan umum (Pemilu) 2024 dan menggunakan teori Anthony Giddens mengenai struktur dan agency sedangkan dalam penelitian ini peneliti lebih fokus bagaimana partai baru lolos Verifikasi dalam sebagai peserta pemilu 2024 dan faktor hambatan dan dukungan dengan teori peter Schorder dan teori partai

Ketiga, Sohibul Watoni dan Renny Candra dewi Puspitarini dengan Judul Strategi Partai Politik Baru : Studi Kasus Strategi Partai Politik Jaring Dukungan Masyarakat Kota Probolinggo.¹⁰ Rumusan Masalah mengkaji strategi partai baru tersebut dalam menjaring dukungan masyarakat. Adapun tujuan penelitian yakni untuk mengetahui bagaimana strategi partai politik baru, dalam menjaring dukungan masyarakat dari partai politik lama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data digunakan dengan triangulasi sumber. Triangulasi sumber mengandung arti bahwa data diperoleh dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara dan desk research. Dengan adanya strategi partai dapat membentuk makna-makna politik dalam benak masyarakat. Khususnya melalui stimulus produk politik yang telah disosialisasikan partai sebelumnya. Makna-makna inilah yang akhirnya mengarahkan pilihan pemilih.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada dukungan masyarakat atas partai baru.sedangkan dalam penelitian ini peneliti lebih lolos verifikasi Partai baru peserta pemilu 2024.

Keempat, Fitria Barokah dan Tabah Maryanah dan Ari Darmasturi dan Hertantodengan Judul Disrupsi Politik: Peluang dan Tantangan Partai Politik Baru Jelang Pemilu 2024. Rumusan Masalah Jurnal ini membahas peluang dan tantangan kemunculan partai-partai baru yang partai hadapi di era disrupsi dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam menghadapi

¹⁰ Sohibul Watoni dan Renny Candra dewi Puspitarini, “Strategi Partai Politik Baru : Studi Kasus Strategi Partai Politik Jaring Dukungan Masyarakat Kota Probolinggo”, *Jurnal Inovasi*, Vol. 3 No.1, 2022.

persaingan elektoral jelang pemilu 2024. Metode penulisan menggunakan literature review dan data akan didapatkan melalui studi kepustakaan, seperti buku, jurnal ilmiah, situs web, dan hal-hal yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil dan analisis dalam tulisan ini menunjukkan bahwa hadirnya partai baru pada pemilu yang diselenggarakan 2024 mendatang tampaknya akan menjadi tahun politik yang berada dalam ambang kerawanan dan perpecahan, adapun strategi yang ampuh untuk meminimalisir perpecahan adalah dengan menanamkan sistem demokrasi internal partai, agar konflik internal antar anggota di dalam partai tidak terjadi kembali. Tantangan lainnya, disrupsi akan membajak peran partai politik jika parpol enggan mengikuti arus disrupsi. Pada era disrupsi munculnya partai-partai politik memberikan peluang untuk pengerahan massa pada saat kampanye dengan menggunakan media sosial yang dinilai lebih efektif, lebih murah, dan memiliki daya jangkau luas dan merata. Selain itu, disrupsi dapat dimanfaatkan parpol untuk strategi branding partai. Namun dampak buruk disrupsi ini dapat menyebabkan perang media sosial di antara partai politik dalam ragam laman media sosial seperti penyebaran berita hoaks.¹¹

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak Pada Tantangan Partai Politik Baru Jelang Pemilu 2024. sedangkan dalam penelitian ini peneliti lebih mengenai strategi partai politik baru lolos verifikasi dan faktor dukungan dan hambatan politik.

¹¹ Fitria Barokah dan Tabah Maryanah dan Ari Darmasturi dan Hertanto, “Disrupsi Politik: Peluang dan Tantangan Partai Politik Baru Jelang Pemilu 2024”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 21, No.1, 2022.

Kelima, Aldho Syafriandre dan Aidinil Zetra dan Feri Amsari dengan Judul Malapraktik Dalam Proses Verifikasi Partai Politik Di Indonesia: Studi Pada Pemilihan Umum 2019. Jurnal ini membahas mengenai Verifikasi partai politik dilakukan untuk mengukur kesiapan dan keterpenuhan syarat partai politik sebagai calon peserta pemilu. Malapraktik yang terdapat pada verifikasi partai politik pemilu 2019 yaitu Pertama, masih adanya celah produk hukum dalam verifikasi partai politik. Kedua, keterbatasan waktu pemeriksaan dokumen dan verifikasi faktual kelengkapan. Ketiga, belum optimalnya Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Keempat, efek malapraktik dalam verifikasi partai politik. Jurnal ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan menggunakan riset kepustakaan. Dalam menganalisis jurnal ini penulis menggunakan sumber data sekunder yang relevan untuk menjelaskan argumentasi utama dalam artikel ini. Adapun tujuan dari tulisan ini adalah menganalisis celah-celah aturan hukum dalam penyelenggaraan pemilu dan malapraktik dalam verifikasi partai politik. Ada beberapa temuan dalam jurnal ini masih adanya celah dalam UU Pemilu mengakibatkan terbatasnya waktu verifikasi sehingga KPU mengubah metode verifikasi. Selain itu, penyelesaian sengketa proses pemilu belum efektif karena banyaknya lembaga peradilan yang terlibat dalam proses sengketa pemilu. Penggunaan Sipol belum diatur oleh UU Pemilu dan verifikasi partai politik belum memperbaiki institusi partai politik dan penurunan kualitas demokrasi.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak Verifikasi partai politik dilakukan untuk mengukur kesiapan dan keterpenuhan syarat partai politik sebagai calon peserta pemilu. sedangkan dalam penelitian ini peneliti lebih spesifikasi strategi partai politik yang lolos verifikasi.¹²

Keenam, Desti Dwi Putri dengan Judul Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Keadilan Dalam Hukum Islam. Jurnal dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efesiensi verifikasi partai politik peserta pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan menganalisis verifikasi partai politik peserta pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perspektif keadilan hukum Islam. Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks baik berupa buku-buku, Undang-Undang tentang Pemilu dan peraturan KPU. Selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif-analitik. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa verifikasi Partai Politik tidak efisien karena melibatkan Partai Politik lama yang sudah diverifikasi sebelumnya dan telah lolos verifikasi di Pemilu 2014. Verifikasi faktual terhadap 12 partai politik calon peserta Pemilu 2019 ulang akan membutuhkan anggaran yang cukup besar sehingga terjadi pemborosan anggaran dan membebani APBN. Verifikasi bukan bentuk diskriminasi antara partai lama dengan partai baru namun lebih pada percepatan proses, efisiensi dan efektivitas dan Prosedur

¹² Aldho Syafriandre dan Aidinil Zetra dan Feri Amsari, “Malapraktik Dalam Proses Verifikasi Partai Politik Di Indonesia: Studi Pada Pemilihan Umum 2019”, *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 4, No. 1, 2019.

verifikasi partai politik dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak sesuai dengan keadilan perspektif hukum Islam yaitu memberikan hak yang sama dan menempatkan sesuatu pada tempat karena tidak perlu dilakukan verifikasi faktual terhadap partai lama dengan mempertimbangkan efisiensi. Anggaran tersebut bisa digunakan untuk pemilu mendatang dan pembangunan bagi kemaslahatan umat verifikasi faktual partai politik bisa menggunakan ambang batas dan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) pada saat pendaftaran calon peserta Pemilu 2019 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah dilaksanakan oleh semua partai politik baik yang lama maupun yang baru.¹³

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada rumusan masalah verifikasi partai politik peserta pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perspektif keadilan hukum Islam. sedangkan dalam penelitian ini peneliti lebih mengenai partai baru lolos verifikasi Peserta Pemilu 2024.

Ketujuh, Rizky Andyka dengan Judul Strategi Partai Garuda Pada Proses Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus DPD Partai Garuda Provinsi Aceh).¹⁴ Verifikasi partai politik adalah penelitian atau pemeriksaan terhadap kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu. Sebagai partai politik baru

¹³ Desti Dwi Putri, “Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Keadilan Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Qiyas*, Vol. 4, No. 2, 2019.

¹⁴ Rizky Andyka, “Strategi Partai Garuda Pada Proses Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus DPD Partai Garuda Provinsi Aceh)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol. -, No. 1-14, 2019.

dibutuhkan penyusunan strategi dilakukan oleh partai Garuda DPD Aceh untuk dapat menghadapi verifikasi partai peserta Pemilu 2019 dan menjadi pemenang pada pemilu 2019 di Aceh. Tujuan penulis dalam penelitian ini ingin menjelaskan bagaimana proses verifikasi partai Garuda sebagai partai politik peserta pemilu tahun 2019, menjelaskan strategi partai Garuda menghadapi verifikasi dan menjelaskan bagaimana marketing politik partai Garuda sebagai partai politik baru peserta Pemilu tahun 2019 serta menjelaskan apa yang menjadi hambatan dan tantangan dalam proses verifikasi partai Garuda. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi pendekatan yaitu observasi, menggunakan teknik wawancara mendalam untuk memahami masalah yang diteliti. Data primer yang diperoleh melalui (wawancara), kemudian data sekunder melalui buku-buku, jurnal, media massa. Kemudian dianalisis menggunakan teori partai politik, Pemilu dan strategi marketing politik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partai Garuda menjalani dua kali proses verifikasi yaitu Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 pasal 173 tentang Pemilu, dalam hal strategi partai Garuda menggunakan upaya pendekatan melalui program kerja yang solutif dalam bidang ekonomi, dalam hal marketing politik partai Garuda menggunakan media sosial sebagai sarana mempromosikan partai dan menggunakan metode gerilya sunyi. Keuangan/pendanaan partai dan tingkat kesadaran kader partai

menjadi hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh partai Garuda DPD Aceh.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada menjelaskan marketing politik partai Garuda sebagai partai politik baru peserta Pemilu tahun 2019. sedangkan dalam penelitian ini peneliti lebih fokus bagaimana strategi partai baru dan faktor hambatan dan dukungan.

Kedelapan, Firmansyah Putra dan A. Zarkasi dengan Judul Peran Bawaslu Provinsi Jambi Dalam Verifikasi Partai Politik Pemilu Tahun 2019. Rumusan masalah untuk mengetahui peran bawaslu provinsi jambi dalam verifikasi terhadap partai politik calon peserta pemilu tahun 2019. Dalam pelaksanaan verifikasi partai politik yang akan diteliti adalah kelengkapan adminitrasi, kelengkapan pengurus, mulai dari, pengurus tingkat provinsi, pengurus tingkat kabupaten/kota serta keterwakilan perempuan. Kemudian keberadaan kantor masing-masing partai politik tersebut, agar pelaksanaan verifikasi partai politik berjalan sebagaimana mestinya. Bawaslu provinsi jambi dalam mengawasi verifikasi partai politik yang ada di provinsi jambi akan menentukan penetapan partai politik yang akan dinyatakan memenuhi syarat untuk ikut dalam pemilihan umum tahun 2019. Penelitian ini menggunakan Penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu peneliti akan melakukan penelitian secara langsung kelapangan untuk melihat fakta secara langsung kemudian dianalisis. Keberadaan Partai politik yang ikut pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai partai politik yang akan ikut dalam pemilu, baik syarat administrasi, kepengurusan partai

baik tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota dan tingkat kecamatan dan desa. Tujuan dari pengawasan verifikasi ini merupakan hal yang sangat penting karena untuk memastikan bahwa partai politik yang diverifikasi memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku, bagi partai yang memenuhi syarat, maka partai tersebut berhak untuk mengikuti pemilu dan sebaliknya, jika hasil verifikasi yang dilakukan ditemukan partai politik yang tidak memenuhi syarat, maka tidak berhak ikut serta dalam pemilu tahun 2019.¹⁵

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada rumusan masalah untuk mengetahui peran bawaslu provinsi jambi dalam verifikasi terhadap partai politik calon peserta pemilu tahun 2019. sedangkan dalam penelitian ini peneliti lebih fokus strategi partai baru lolos verifikasi Peserta Pemilu 2024 dan faktor hambatan dan dorongan.

Kesembilan, Rendy Ivaniar, dengan Judul Efektifitas Sistem Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Mewujudkan Sistem Multi Partai Sederhana. Jurnal ini berisi Negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial, Indonesia terus mengembangkan sistem penyederhanaan partai politik dalam parlemen agar terbentuk sistem multi partai sederhana untuk mendukung pemerintahan yang stabil. Salah satu cara menyederhanakan partai politik di parlemen adalah dengan mengurangi peserta Pemilihan Umum. Oleh karena itu dibutuhkan pengembangan sistem yang efektif untuk menyederhanakan partai politik peserta pemilihan umum. Penelitian ini

¹⁵ Firmansyah Putra dan A. Zarkasi, "Peran Bawaslu Provinsi Jambi Dalam Verifikasi Partai Politik Pemilu Tahun 2019", *Jurnal Trias Politika*, Vol 4. No.2, 2020.

bertujuan untuk mengetahui, memaparkan dan menganalisis efektifitas sistem verifikasi partai politik peserta pemilihan umum selama ini untuk menghasilkan sistem multi partai sederhana dan pengembangan verifikasi partai politik peserta pemilihan umum untuk mewujudkan pengaturan sistem multi partai sederhana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Pengambilan data primer dilakukan dengan teknik wawancara kepada responden. Setelah data terkumpul lengkap dan telah diolah dengan menggunakan narasi atau tabel maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem yang paling efektif untuk menyederhanakan peserta pemilihan umum adalah melalui pengefektifan sistem verifikasi dengan pengetatan persyaratan peserta pemilihan umum dan melakukan verifikasi faktual. Pengembangan sistem verifikasi yang dilakukan di Indonesia ternyata mengalami pasang surut konsistensi untuk menerapkan pengetatan persyaratan peserta pemilihan umum. Akan tetapi pada pemilihan umum tahun 2014 telah mulai dilakukan pengembangan sistem pengetatan persyaratan peserta pemilihan umum secara maksimal dengan dukungan Mahkamah Konstitusi apabila terdapat peraturan yang tidak sesuai dengan UUD NRI 1945.¹⁶

¹⁶ Rendy Ivaniar, "Efektifitas Sistem Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Mewujudkan Sistem Multi Partai Sederhana", *Jurnal Hukum tata negara*, 2013.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada pengembangan sistem yang efektif untuk menyederhanakan partai politik peserta pemilihan umum. sedangkan dalam penelitian ini peneliti lebih fokus partai baru lolos Verifikasi Peserta Pemilu 2024 dan faktor hambatan dan dukungan.

Kesepuluh, Iwan Setiawan dengan judul Desain Pemilu Multi Partai Sederhana (Kritik Terhadap Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik). Jurnal ini berisi mengenai mendesain perwujudan pemilu dengan multi partai sederhana di Indonesia melalui kritik terhadap mekanisme verifikasi partai politik yang selama ini sudah dilakukan namun tetap tidak membuat peserta pemilu menjadi sederhana justru semakin bertambah. Amandemen terhadap UU No.2 Tahun 2011 terkait PARPOL & UU No.7 Tahun 2017 perihal pemilu sebagai jendela awal agar menyederhanaan partai politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partai politik yang tidak berhasil memposisikan kadernya di DPR RI tidak bisa maju kembali untuk ikut serta pemilu di tahun selanjutnya apabila tidak ikut serta dengan partai politik lainya maupun merubah identitas dengan partai politik baru. Padahal tujuan awal dilaksanakannya verifikasi partai politik selain memastikan bahwa kepengurusan partai politik dari tingkat pusat hingga daerah khususnya kecamatan masih aktif juga untuk melakukan penyederhanaan partai politik peserta pemilu. Penulisan jurnal dengan judul “Desain Pemilu Multi Partai Sederhana (Kritik terhadap pelaksanaan verifikasi partai Politik)” memakai metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengambilan

data yakni teknik pengumpulan kajian literature dari sumber buku, artikel, jurnal ilmiah, undang-undang dengan beragam berita dari lini berita baik printed/online dengan dokumen yang tersebar baik di penyelenggara pemilu yang meliputi KPU dan Bawaslu. Data sekunder penulis diperoleh melalui direct interview langsung pada narasumber khususnya para penyelenggara pemilu dengan media alat komunikasi handphone (HP).¹⁷

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak kritik terhadap mekanisme verifikasi partai politik yang selama ini sudah dilakukan namun tetap tidak membuat peserta pemilu menjadi sederhana justru semakin bertambah. sedangkan dalam penelitian ini peneliti lebih fokus strategi partai baru lolos Verifikasi Peserta pemilu serta hambatannya.

Kesebelas, Ahmad Gelora Mahardika dengan Judul Rekonstruksi Verifikasi Partai Politik Sebagai Penegakan Asas Efisiensi Dan Efektivitas Pemilihan Umum. Sebagai tahapan dalam penyelenggaraan pemilu, verifikasi partai politik menjadi penting. Rumusan Masalah bagaimanakah rekonstruksi Verifikasi Partai Politik Sebagai Penegakan Asas Efisiensi Dan Efektivitas Pemilihan Umum. Metode penelitian dalam jurnal ini adalah yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan verifikasi parpol yang saat ini terjadi tidak efisien karena menyebabkan duplikasi sehingga perlu ditata ulang, Dikarenakan adanya kesamaan norma, penulis melihat bahwa terkait dengan pelaksanaan verifikasi partai politik perlu untuk dilakukan perubahan pada Undang-Undang Pemilu dimana perlu untuk dicantumkan ketentuan

¹⁷ Iwan Setiawan, "Desain Pemilu Multi Partai Sederhana (Kritik Terhadap Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik)," *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, Vol. 8, No. 2, 2022.

baru yang mengatur terkait dengan verifikasi partai politik yang mana Partai Politik baru yang telah lolos verifikasi untuk memperoleh status badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tidak perlu dilakukan verifikasi ulang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagai upaya untuk menghindari duplikasi verifikasi partai politik.¹⁸

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada rumusan masalah bagaimanakah rekonstruksi Verifikasi Partai Politik Sebagai Penegakan Asas Efisiensi Dan Efektivitas Pemilihan Umum. sedangkan dalam penelitian ini peneliti lebih fokus bagaimana strategi Partai baru lolos Verifikasi peserta pemilu 2024 dan faktor hambatannya.

Kedua belas, Hery Wibowo Trisakson dengan Judul Verifikasi Faktual Parpol Dalam Perspektif Justice As Fairness. Dengan Rumusan masalahn apakah verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2019 kepada semua parpol seperti tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, telah sesuai dengan prinsip keadilan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bertujuan agar tercipta keadilan pemilu. Sehingga seluruh partai politik harus mengikuti verifikasi faktual partai politik yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi mendasarkan pendapat konstitusionalnya pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai dasar putusan tentu keputusan tersebut sudah pada tempatnya, tetapi

¹⁸Ahmad Gelora Mahardika, "Rekonstruksi Verifikasi Partai Politik Sebagai Penegakan Asas Efisiensi Dan Efektivitas Pemilihan Umum", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2020.

kurang substansial. Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum tentang keadilan hanya menggunakan ‘prinsip persamaan’, padahal dalam teori keadilan juga mengkaji mengenai ‘prinsip perbedaan’. Sehingga Mahkamah Konstitusi perlu menambahkan alasan hukum dalam putusannya mengenai prinsip perbedaan dalam teori keadilan. Dengan demikian maka sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut. Pertama, peneliti akan mengelaborasi konsepsi keadilan berdasarkan teori keadilan yang dikembangkan oleh Rawls yang mempertimbangkan secara proporsional, dalam rangka keadilan, persamaan dan perbedaan perlakuan hukum. Hasil pembahasan ini akan diposisikan sebagai prinsip interpretif dalam memaknai Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Kedua, atas dasar konsepsi tersebut penulis selanjutnya akan mengkritisi pendapat yudisial MKRI yang kurang tepat (dalam hal ini terlalu formal dan kurang substantif dalam memaknai Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian dalam menentukan konstitusionalitas Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemilu.¹⁹

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada Rumusan masalahn apakah verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2019 kepada semua parpol seperti tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, telah sesuai dengan prinsip keadilan. sedangkan dalam penelitian ini peneliti lebih fokus strategi Partai baru lolos Verifikasi peserta pemilu 2024.

¹⁹ Hery Wibowo Trisakson, “Verifikasi Faktual Parpol Dalam Perspektif Justice As Fairness Hery Wibowo Trisakson”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No.2, 2019.

Ketiga belas, Febriansyah Kurniawan dan Retno Sari Handayani dengan Judul Evaluasi Mekanisme Pendaftaran Dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019. Rumusan masalah Bagaimana Tantangan tersendiri bagi partai politik untuk dapat turut berkompetisi dalam proses peralihan kekuasaan? Untuk menjadi peserta Pemilu, partai politik harus melewati sejumlah tahapan dan beberapa persyaratan yang telah diatur dalam perundang-undangan Pemilu, salah satunya yakni jumlah keanggotaan yang dimiliki oleh partai politik. Idealnya, partai politik merekrut masyarakat yang memiliki cita-cita dan pandangan yang sama sebagai anggotanya, namun kenyataannya, partai politik cenderung menghalalkan segala cara guna memenuhi jumlah keanggotaan yang dipersyaratkan. Jurnal ini bertujuan mendeskripsikan dinamika partai politik pada masa verifikasi partai politik di tingkat Kabupaten Batang Hari serta upaya yang ditempuh agar partai politik berhasil memenuhi syarat sebagai peserta pemilu. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini mengumpulkan sumber data melalui wawancara serta kajian literatur dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini menemukan bahwa pada banyak praktek akal-akalan saat proses verifikasi partai politik yang dilakukan oleh oknum di dalam partai politik yakni pencatutan sejumlah orang sebagai anggota partai politik. Selanjutnya, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ada kelemahan regulasi dalam keterbukaan informasi mengenai keanggotaan partai politik.²⁰

²⁰ Febriansyah Kurniawan dan Retno Sari Handayani, "Evaluasi Mekanisme Pendaftaran Dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019", *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol.13, No.1, 2022.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada Rumusan masalah Bagaimana Tantangan sendiri bagi partai politik untuk dapat turut berkompetisi dalam proses peralihan kekuasaan. sedangkan dalam penelitian ini peneliti lebih fokus pada strategi proses Verifikasi partai baru peserta pemilu 2024.

Keempat belas, Robert Hoffman dengan Judul Pelaksanaan Verifikasi Terhadap Syarat Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019. pelaksanaan Verifikasi terhadap parpol peserta pemilu tahun 2019 telah dilaksanakan di seluruh Indonesia, namun pelaksanaan verifikasi khususnya pada syarat keanggotaan partai politik peserta pemilu meninggalkan sejumlah catatan yang mengindikasikan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum belum optimal melaksanakan verifikasi syarat keanggotaan parpol peserta pemilu tahun 2019. Oleh karena itu, penulis tertarik mengadakan penelitian ini, yang diberi judul: “Pelaksanaan Verifikasi Terhadap Syarat Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan sosiologis (empiris). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa verifikasi terhadap syarat keanggotaan partai politik peserta pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sintang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sintang dengan 2 (dua) tahap yaitu tahap penelitian administrasi dan tahap verifikasi faktual. Penelitian administrasi dilakukan dengan penelitian kelengkapan, kebenaran dan keabsahan terhadap dokumen persyaratan keanggotaan partai politik dan

verifikasi faktual dilakukan dengan membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan partai politik calon peserta pemilu dan pelaksanaan verifikasi terhadap syarat keanggotaan partai politik peserta pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sintang mengalami hambatan baik dari substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa Pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sintang terhadap syarat keanggotaan partai politik peserta pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sintang dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu tahap penelitian administrasi dan tahap verifikasi faktual dan pelaksanaan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2018) dan faktor penghambat dalam pelaksanaan verifikasi terhadap syarat keanggotaan partai politik peserta pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sintang terdapat pada faktor substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum, sehingga pelaksanaannya belum efektif. Dari hasil kesimpulan penulis sarankan bahwa Pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sintang terhadap syarat keanggotaan partai politik peserta pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sintang agar selalu dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan faktor penghambat dalam pelaksanaan verifikasi terhadap syarat keanggotaan partai politik peserta pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sintang pada faktor

substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum agar diperbaiki sehingga pelaksanaannya dapat efektif.²¹

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pelaksanaan Verifikasi terhadap parpol peserta pemilu tahun 2019 sejumlah catatan yang mengindikasikan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum belum optimal melaksanakan verifikasi syarat keanggotaan parpol peserta pemilu tahun 2019. sedangkan dalam penelitian ini peneliti lebih fokus bagaimana strategi partai baru lolos Verifikasi peserta pemilu 2024 dan faktor hambatannya.

Kelima belas, Wabil Fadli Sultan dan Sukri dan Ariana Yunus dengan Judul Perbandingan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2019 dan 2024. Rumusan Masalah Bagaimana Perbandingan Verifikasi Peserta pemilu tahun 2019 dan 2024. Selain itu, dalam jurnal ini memaparkan masalah-masalah yang muncul pada proses verifikasi berlangsung. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan pada penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Teknik Studi Pustaka. Penulis menggunakan karya tulis Ilmiah seperti Jurnal, Tesis, dan Dokumen Negara dalam mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan penulis kemudian dilakukan pengolahan data tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang dikerjakan. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan mendasar mengenai proses verifikasi peserta pemilu tahun 2019 dan 2024 adalah tidak adanya

²¹ Robert Hoffinan, "Pelaksanaan Verifikasi Terhadap Syarat Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019", *Jurnal Perahu*, Vol. 7, No. 2, 2019.

verifikasi Faktual bagi partai Parlemen peserta pemilu 2024. Permasalahan yang paling mendasar dari setiap verifikasi yang dilakukan adalah keanggotaan partai Politik yang masih terdapat pencatutan nama anggota. Dampak dari pencatutan nama tersebut adalah hak-hak masyarakat yang dapat menimbulkan kerugian khususnya bagi masyarakat pencari kerja oleh karena adanya ketentuan tidak terlibat sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik. Perlu dilakukan verifikasi faktual kepengurusan, domisili kantor dan verifikasi keanggotaan tanpa membedakan partai kecil dan partai besar secara proporsional dan berkeadilan. Dengan adanya integritas dalam verifikasi partai politik akan menghasilkan pejabat publik dari partai politik yang kredibel dan berkualitas.²²

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada Rumusan Masalah Bagaimana Perbandingan Verifikasi Peserta pemilu tahun 2019 dan 2024. sedangkan dalam penelitian ini peneliti lebih fokus lolosnya Verifikasi partai baru peserta Pemilu 2024.

Secara Umum, Penelitian ini akan menggambarkan Bagaimana Strategi Partai Gelora Kabupaten Sampang supaya lolos Verifikasi peserta pemilu 2024 serta faktor hambatan dan dukungan. Penelitian ini juga tidak terfokus satu informan saja, melainkan akan mengambil informan yang dinilai bisa memberikan data-data yang sesuai dengan kebutuhan peneliti.

²² Wabil Fadli Sultan dan Sukri dan Ariana Yunus, "Perbandingan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2019 dan 2024", *Jurnal of Social Religion Research*, Vol.7, No. 2, 2022.

B. Landasan Teori

Teori yang akan digunakan untuk menjelaskan fenomena strategipolitik yang dirumuskan oleh Peter Schorder dan Teori tentang partai yang politik oleh Miriam budiardjo :

1. Strategi Politik

a. Teori Strategi Politik

Menurut Peter schorder,²³ strategi yang digunakan untuk merealisasikan cita-cita politik. Contohnya pemberlakuan peraturan baru, pembentukan suatu aturan baru dalam administrasi pemerintah atau dijalankannya program deregulasi, privastisasi atau desentralisasi. Peter schorder berpendapat bahwa strategi politik adalah suatu cara untuk mendapatkan kekuasaan agar dapat merealisasikan cita-cita politik. Hal ini juga seringkali menjadi permasalahan untuk rakyat, karena apabila strategi yang digunakan kurang tepat akan menghasilkan produk atau peraturan yang kurang baik.

b. Jenis-Jenis Strategi

Dalam konteks politik, strategi umumnya merupakan taktik untuk meningkatkan tujuan tertentu, di mana kemampuan individu dan kemampuan kelompok menjadi andalan. Strategi selanjutnya tergantung pada sejauh mana pemahaman dan penguasaan kondisi lapangan dicapai, termasuk adaptasi dengan karakteristik objek dan

²³ Peter Schroder, *Strategi Politik*, (Jakarta : Friedrich-Naumman- Stiftung, 2004), 25

orang-orang sosiologis di daerah yang heterogen. Oleh karena itu, beberapa teori di bawah ini akan lebih menjelaskan tentang keluasan makna strategi dan variabel pendukungnya.

Saat memilih, kita perlu mengidentifikasi pola dasar strategi yang kita butuhkan untuk membuat pilihan yang tepat, menurut *Pether Schorder* dalam Adman Nursal (2006). Pada dasarnya strategi dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:²⁴

1) Strategi Defensif (Intensifikasi Internal)

Strategi defensif muncul ketika partai yang berkuasa atau koalisi penguasa yang terdiri dari beberapa partai ingin mempertahankan mayoritas pasar. Selain itu, strategi ini terjadi ketika pasar tidak berkelanjutan atau hampir tutup, dan menutup pasar tersebut diharapkan menghasilkan keuntungan sebanyak mungkin. Dalam strategi retensi pasar, partai harus mempertahankan pemilih tetap mereka dan memperkuat pemahaman mereka tentang pemilih di masa lalu di bawah situasi saat ini. Pihak-pihak yang berusaha mempertahankan pasar mengambil posisi yang berlawanan dengan pihak-pihak yang mengejar strategi ofensif. Pihak yang menerapkan strategi defensif melakukan pemeliharaan intensif di beberapa wilayah yang ada dan menawarkan insentif kepada kader. Data tentang keberhasilan yang dicapai disebarkan ke lingkungan sekitar.

²⁴ Peter Schroder, *Strategi Politik*, (Jakarta: FNF Indonesia, 2006), 8.

Investigasi biasanya dilakukan di bidang hubungan masyarakat. Dalam organisasi, proses disederhanakan, rutinitas ditingkatkan dan dengan demikian biaya berkurang. Sebagian besar partai yang menerapkan strategi pertahanan adalah partai yang sudah berdiri sejak lama dan sudah memiliki banyak simpatisan di seluruh wilayah.

2) Strategi Ofensif (Ekspansi Eksternal)

Strategi ofensif selalu diperlukan jika sebuah partai ingin meningkatkan jumlah pemilih, atau jika seorang legislator ingin menerapkan kebijakan yang diberikan, perbedaan antara kondisi saat itu dan manfaat yang dapat diharapkan. Ekspansi pasar dan penetrasi pasar menjadi kunci dalam strategi ini. Strategi ini diperlukan jika partai ingin menambah atau menambah jumlah pemilih.

Dalam hal ini, pasti banyak orang yang memiliki opini positif terhadap partai tersebut, sehingga nantinya kampanye yang dilakukan partai politik tersebut akan berhasil. Strategi perluasan pasar bertujuan untuk menciptakan kelompok pemilih baru selain pemilih yang sudah ada. Oleh karena itu, harus ada penawaran yang lebih baik bagi pemilih yang memilih partai pesaing.

Strategi ini harus disiapkan dengan kampanye untuk menjelaskan kepada publik penawaran baru dan penawaran

mana yang lebih baik dari penawaran lain dari pihak lain. Perluasan merek ini dapat dicapai melalui kualitas dan urusan kreatif dan program kampanye. Selain itu, tawaran tersebut harus memperhitungkan manfaat yang diterima kotamadya dari pihak baru. Sedangkan strategi memasuki pasar, strategi untuk mendapatkan potensi yang ada saat ini adalah yang terbaik Hal ini mencakup lebih baiknya pemasaran program-program yang diselenggarakan oleh masyarakat umum dan meningkatkan intensitas keselarasan antara program dan kader partai secara individu, serta meningkatkan tekanan pada tujuan yang mereka kelompokkan bersama. Sebagian besar partai yang menerapkan strategi ofensif adalah partai yang baru dibentuk dan memiliki sedikit simpatisan di seluruh wilayah. Partai dan kader harus menyadari secara mendalam kemungkinan keuntungan partai dan kader. Potensi keuntungan ini dapat dimanfaatkan oleh partai dan kader untuk melakukan kampanye, untuk mendapatkan konstituen tetap.

3) Strategi Pencitraan

Strategi ini biasanya dilakukan di media elektronik seperti televisi dan media sosial seperti Facebook dan Twitter. Selain itu, media cetak juga sering digunakan oleh para kandidat untuk mencitrakan masing - masing kandidat. Strategi display sering digunakan untuk membentuk pola pikir masyarakat terhadap

partai atau kandidat tertentu. Strategi ini sangat cocok bagi partai-partai baru yang ingin memperkenalkan partai dan calonnya kepada masyarakat luas guna meningkatkan jumlah pemilih.

4) Strategi Ketokohan dan Kelembagaan

Strategi ini dilakukan oleh calon anggota legislatif yang memiliki peran sebagai orang yang disegani di masyarakat atau menggunakan sejumlah orang lain sebagai jaringan untuk mendapatkan suara dan memperkuat lembaga politik atau lembaga organisasi lain yang mereka miliki di masyarakat. Strategi ini adalah strategi kampanye, pikir Anwar Arifin. Selain menggunakan jumlah dan memperkuat institusi, kemampuan dan dukungan institusi untuk mengumpulkan pesan politik, menentukan metode dan memilih media politik yang tepat juga penting untuk meningkatkan proses komunikasi politik.²⁵

2. Partai Politik

a. Definisi Partai Politik

Menurut Miriam budiardjo partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan dan berebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-

²⁵ Anwar Arifin, *Pencitraan dalam politik strategi pemenangan pemilu dalam prespektif komunikasi politik*, (Jakarta: Pustaka Indonesia, 2006),103.

kebijaksanaan mereka.²⁶ Pada dasarnya, partai politik bertujuan untuk menghimpun kekuatan dan dukungan rakyat dalam bersinergi pada pemikiran yang sama untuk meraih tujuan.

Sedangkan ciri-ciri partai politik :

- 1) Berakar dalam masyarakat lokal
- 2) Melakukan kegiatan terus-menerus
- 3) Berusaha memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintah
- 4) Ikut serta dalam pemilihan umum.

Ada beberapa hal yang dinarasikan dalam teori partai politik antara lain :

Miriam Budiarto²⁷ mengatakan bahwa partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan yang dimaksud dalam pengertian ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik atau merebut kedudukan politik secara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan umum.

Sigmund Neumann dalam Miriam Budiarto (2008, hlm. 404) berasumsi bahwa partai politik ialah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan

²⁶ Budiarto, *Dasar-dasar*, 403.

²⁷ Miriam Budiarto, *Dasar- Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 403.

atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

Ramlan surbakti²⁸ mendefinisikan partai politik ialah suatu kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang di satukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun.

Berdasarkan teori-teori di atas maka dapat disimpulkan bahwa Partai politik merupakan organisasi politik yang memiliki ideologi dan cita-cita tertentu yang ingin diraih secara bersama-sama dan memiliki tujuan untuk merebut dan atau mempertahankan kekuasaan dengan cara bersaing dalam pemilu untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana sukses kepemimpinan politik secara sah (*legitimate*).

²⁸ Ramlan surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 1992), 114.

b. Fungsi Partai Politik

Partai politik mempunyai peran yang sangat penting Adapun peran dan fungsi partai politik menurut Ramlan surbakti²⁹ yaitu:

1) Sosialisasi Politik

Partai politik berfungsi sebagai sarana sosialisasi politik yaitu proses pembentukan sikap orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal maupun tidak disengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga dan tetangga maupun dalam kehidupan masyarakat.

2) Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. Fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan perannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam.

²⁹ Ramlan surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 1992), 118.

3) Partisipasi Politik

Partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintah. Dalam hal ini partai politik mempunyai fungsi untuk membuka kesempatan, mendorong dan mengajak para anggota dan anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan mempengaruhi proses politik.

4) Pemandu Kepentingan

Partai politik berfungsi untuk menampung dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan makna partai politik dibentuk. Kegiatan menampung, menganalisis dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan menjadi berbagai alternatif kebijakan umum, kemudian diperjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

5) Komunikasi Politik

Komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Dalam hal ini, partai politik berfungsi sebagai komunikator politik yang tidak hanya menyampaikan segala keputusan dan penjelasan pemerintah

kepada masyarakat sebagaimana diperankan oleh partai politik dinegara otoliter tetapi juga menyampaikan aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat kepada pemerintah.

6) Pengendali Konflik

Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan ke dalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik.

7) Kontrol Politik

Kontrol politik ialah kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Tolak ukur suatu kontrol politik berupa nilai-nilai politik yang dianggap ideal dan baik (ideologi) yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan atau peraturan peraturan perundang-undangan. Tujuan kontrol politik, yakni meluruskan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan yang menyimpang dan memperbaiki yang keliru sehingga kebijakan dan pelaksanaannya sejalan dengan tolak ukur tersebut.

c. Tipologi Partai Politik

Pengklarifikasian berdasarkan kriteria tertentu seperti Asas dan orientasi, komposisi dan fungsi anggota, basis sosial dan tujuan. Meskipun sebenarnya klasifikasi ini merupakan tipe ideal yang sulit ditemukan dalam kenyataan, namun hal ini berguna untuk memudahkan pemahaman.

Asas dan Orientasi Berdasarkan kriteria ini politik dibagi menjadi tiga tipe :

1) Partai Politik Pragmatis

Partai yang Program dan kegiatannya tidak terikat secara kaku pada suatu doktrin dan ideologi tertentu.

2) Partai Doktrin

Partai politik yang memiliki sejumlah program dan kegiatan kongkret sebagai pencapaian ideologi. Ideologi yang dimaksud adalah nilai politik yang sistematis dalam bentuk program dan pelaksanaannya diawasi oleh aparat partai.

3) Partai Kepentingan

Partai politik yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, etnis, agama, atau lingkungan hidup yang secara langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena seperti; persepsi, motivasi, perilaku, Tindakan dan faktor lain yang dihadapi. Secara holistik, melalui penjelasan dengan bentuk kata dan bentuk kebahasaan pada konteks khusus alamiah serta menggunakan berbagai metode ilmiah.³⁰

Sugiono mengatakan pendekatan kualitatif sebagai studi yang mempelajari objek alamiah, peneliti merupakan instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara komoleks, analisis data versifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dibandingkan generalisasi.³¹

Metode studi kasus digunakan pada penelitian ini. Studi kasus adalah serangkaian kegiatan ilmiah yang intens, terperinci dan mendalam yang dilakukan sehubungan dengan rencana, peristiwa, dan kegiatan pada tingkat individu, publik, institusi atau organisasi, biasanya merupakan studi kasus sebuah peristiwa pilihan.

³⁰ Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2010), 6.

³¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2007), 1.

Studi kasus pada penelitian ini yaitu partai baru lolos verifikasi partai peserta pemilu 2024 pada partai Gelora di Kabupaten Sampang. Di satu sisi, Munculnya Partai-Partai Baru disebabkan masuknya Indonesia ke dalam sistem mutipartai yang tak terhingga, hal tersebut merupakan sebuah konsekuensi adanya demokrasi dan reformasi. Situasi itulah yang memberikan kesempatan dan peluang bagi partai Gelora kabupaten Sampang.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat untuk melakukan penelitian dan menginformasikan kepada informan mengenai data yang mereka butuhkan. Hal ini dikarenakan penentuan lokasi peneliti berlokasi di Jl. Rajawali No. 13, Sampang yaitu kantor DPD Partai Gelora Kabupaten Sampang alasan untuk memilih lokasi tersebut untuk mempermudah peneliti. Dengan hadirnya Partai Gelora Kabupaten Sampang tersebut salah satu partai baru yang unggul dalam gerakan gerakan dari pada Partai baru yang lain dan perlu diteliti karena partai tersebut mempunyai kelayakan terhadap masyarakat.

3. Informan Penelitian

Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan *sample* didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sampel).³² Informan ini dibutuhkan untuk mengetahui Strategi Partai Gelora Kabupaten Sampang supaya lolos Verifikasi peserta pemilu 2024.

³² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 85.

Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan menggunakan Purposive Sampling, artinya teknik penentuan sumber data mempertimbangkan terlebih dahulu, bukan diacak. Artinya menentukan informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian.³³

Informan yang di tunjuk oleh peneliti untuk memberikan informasi untuk mengetahui Strategi partai baru lolos Verifikasi Peserta Pemilu 2024 (Studi Kasus Partai Gelora Kabupaten Sampang), berikut beberapa informan yang diminta data informasi sesuai judul, yaitu:

Tabel 3.1
Daftar Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Usia
1	Abd muhlis	Ketua DPD Gelora Kabupaten Sampang	45 Tahun
2	Junaidi	Sekretaris DPD	35 Tahun
3	Sahrul Mukarrom	Bendahara DPD	33 Tahun
4	Ainul Fakhri	Ketua DPC Gelora Kabupaten Sampang	33 Tahun
5	Badrul munir	Anggota	24 Tahun
6	Hisbul	Anggota	22 Tahun
7	Muslihah	Anggota	31 Tahun
8	Siti Aisyah	Komisioner KPUD Sampang	35 Tahun

³³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, (Fajar Interpratama Offset, Jakarta: 2007), 107.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mengamati objek secara langsung dan detail untuk mencari informasi tentang objek tersebut. Dan merupakan salah satu serangkaian metode penelitian kualitatif yang melakukan pengamatan & pencatatan terhadap sebuah fenomena yang terjadi secara sistematis.³⁴

Observasi *non partisipatif* digunakan peneliti yang artinya dalam pelaksanaan tersebut peneliti tidak hadir dalam kegiatan yang dilakukan oleh subyek di amati, peneliti hanya mengamati keadaan.

Alat bantu instrument observasi dapat menjadi pendukung saat dilapangan, diantaranya; Panduan Observasi, Catatan berkala, elektronik seperti; audio-tape / video-tape, serta *camera* untuk memperoleh gambaran dari kegiatan tingkah laku, dapat diputar kembali bila diperlukan dan bisa jadi lebih teliti serta akurat.

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengumpulkan data mengenai proses Strategi Partai Gelora Kabupaten Sampang.

b. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Dalam teknik pengumpulan menggunakan data menggunakan wawancara, dibagi menjadi 3 kelompok yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur dan wawancara mendalam (*indepth*

³⁴ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif (dalam Penelitian Pendidikan Bahasa)*, (Surakarta; Cakra Books, 2014), 132.

interview). Peneliti memilih melakukan wawancara mendalam, ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi untuk menghindari kehilangan informasi.³⁵

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat terbuka. Pelaksanaannya dilakukan tidak sekali dua kali, melainkan berulang-ulang. Di dalam proses pelaksanaan sebelum mengumpulkan data di lapangan, akan disusun daftar pertanyaan yang digunakan sebagai pedoman wawancara. Namun, pedoman tersebut bukanlah sesuatu yang bersifat ketat. Melainkan bersifat fleksibel sesuai situasi dan kondisi di lapangan. Pedoman wawancara ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kehabisan pertanyaan ketika wawancara berlangsung. Pengamatan dilakukan kepada orang-orang yang paham dan mengenal secara mendalam terhadap permasalahan yang dikaji³⁶. Instrumen dalam wawancara mendalam yaitu pedoman wawancara (*interviewguide*), bolpoin, alat perekam (*recorder*), kamera, dan buku catatan lapangan.

c. Dukumentasi

Dokumentasi dapat berupa gambar dan transkrip wawancara. Dokumen adalah hasil karya seseorang atas hal-hal telah berlalu. Dokumen tentang individu ataupun kelompok, peristiwa yang berhubungan dengan penelitian merupakan media informasi yang

³⁵ Basuki, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006), 173.

³⁶ *Ibid*

menguntungkan pada penelitian kualitatif.³⁷ Pengumpulan dokumen berupa gambar pada saat penelitian dilakukan sebagai bukti data yang ada adalah data yang akurat. Peneliti mengumpulkan benda-benda tertulis seperti buku-buku, catatan-catatan serta foto yang ditemukan dilapangan.

5. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah suatu kegiatan mengelompokkan, membuat suatu urutan manipulatif serta menyingkatkan data sehingga mudah dibaca. Dalam penelitian ini data yang diperoleh akan dianalisis melalui analisa kualitatif, yaitu menganalisa data, memecahkan permasalahan dengan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini.³⁸

Analisa data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan menyiapkan dan mengorganisasikan data (yaitu, data teks seperti transkrip, atau data gambar) untuk analisis, kemudian mereduksi data tersebut menjadi tema melalui proses pengodean dan peringkasan kode. Dan terakhir menyajikan data dalam bentuk bagan, tabel, atau pembahasan.³⁹

³⁷ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 391.

³⁸ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press, 2001), 91.

³⁹ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih Di Antara Lima Pendekatan, Terj. Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches, Third Edition*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), edisi ke-3, 251.

Miles dan Habermas menyatakan bahwa terdapat tiga tahapan dalam menganalisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Langkah-langkah yang ditempuh adalah⁴⁰ :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan data. Pada tahap ini akan dipusatkan pada data lapangan yang telah terkumpul. Data lapangan itu, kemudian dipilih, untuk dilihat kerelevansiannya terhadap tujuan penelitian. Berbagai data yang terpilih, disederhanakan, diklasifikasikan serta dijabarkan atas dasar tema untuk merekomendasikan data tambahan. Kemudian hasilnya akan diuraikan secara singkat dalam bentuk ringkasan.

b. Tahap Penyajian Data (*Display*)

Penyajian data dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian, dengan membuat penggambaran secara deskriptif masalah yang diteliti. Pada tahap ini penyajian data dilakukan dalam bentuk teks naratif terlebih dahulu. Hasil teks naratif tersebut diringkas dalam bentuk uraian sederhana yang menggambarkan alur proses hasil temuan. Penyajian informasi hasil penelitian dilakukan berdasarkan susunan yang telah di sesuaikan dalam uraian tersebut.

⁴⁰ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 229.

c. Verifikasi (Kesimpulan)

Tahap ini akan dilakukan uji kebenaran dari setiap makna yang muncul pada data penelitian. Disamping menyandarkan pada klarifikasi data, perlu juga memfokuskan perhatian pada abstraksi data yang tertuang dalam uraian. Setiap data yang menunjang komponen uraian diklasifikasikan kembali, baik dengan informan di lapangan maupun melalui diskusi-diskusi dengan rekan. Apabila hasil klarifikasi memperkuat simpulan atas data, maka pengumpulan data untuk komponen tersebut siap dihentikan.

6. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam melakukan pengecekan data kualitatif harus memperhatikan beberapa kriteria. menurut Lexy Moleong, kriteria tersebut adaah sebagai berikut:⁴¹

a. Kredibilitas (*credibility*)

Kredibilitas ini merupakan konsep alternatif validitas internal dalam penelitian kualitatif. Teknik untuk menentukan kredibilitas penelitian adalah dengan memperpanjang periode observasi, melakukan oservasi terus menerus, melakukan triangulasi, berbicara dengan orang lain, menganalisis kasus negatif, menggunakan bahan refrensi, dan melakukan *member check*.

⁴¹ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 1993), 125.

b. Kepastian (*confirmability*)

Konsepsi tersebut menggantikan objektivitas dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, objektivitas diukur oleh orang atau peneliti itu sendiri. Konfirmasi ini mirip dengan pengujian realibilitas, sehingga dapat diuji pada saat yang bersamaan, konfirmasi tes mengacu berdasarkan temuan penelitian yang melibatkan dilakukannya tes. Demikian dikatakan bahwa temuan tersebut memenuhi standar konfirmabilitas, apabila temuan penelitian tersebut merupakan kewajiban dari proses penelitian. Maka hal tersebut sudah teramsuk dalam pemenuhan strandar konfirmabilitas dalam penelitian, jangan sampai prosesnya tidak ada, tapi ada hasilnya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

7. Jadwal Penelitian

Tabel 3. 3

Waktu Pelaksanaan Penelitian

No.	Uraian Kegiatan	Waktu					
		November	Desember	Januari	Februari	Maret	April
1	Pembuatan Proposal	✓					
2	Seminar Proposal		✓				
3	Pengumpulan Data			✓			
4	Pengolahan Data				✓		
5	Penulisan Draft Laporan Penelitian					✓	
6	Sidang Skripsi						✓
7	Penggandaan dan Penyerahan Laporan						✓

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Partai Gelora Sampang

1. Sejarah

Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Partai Gelora Indonesia didirikan pada 28 Oktober 2019 dengan gagasan dan cita-cita menjadikan Indonesia kekuatan Lima besar dunia. Gagasan ini pertama kali disampaikan Anis Matta dalam pidato "Arah Baru Indonesia" dalam acara Musyawarah Kerja Keluarga Alumni KAMMI di Jakarta, 3 Februari 2018. Pidato ini menyambung gagasan "Gelombang Ketiga Indonesia" yang ditulis Anis pada 2014.

Selanjutnya, proses untuk mendirikan Partai dimulai dengan membentuk Tim Persiapan Pembentukan Partai Baru yang dipimpin Mahfudz Siddiq. Selain telah resmi memiliki badan hukum, saat ini Partai Gelora Indonesia telah memiliki kepengurusan di 34 DPW setingkat provinsi, 445 DPD setingkat kabupaten & kota, serta 4.395 DPC setingkat kecamatan.⁴²

Proses pada berdirinya sebuah partai diawali pada pertemuan Gerakan arah Baru Indonesia (GARBI) Madura Raya di Kabupaten Pamekasan pada 23 Februari 2019 dan pada waktu itu yang bernama Sahrul Mukarom menghadiri dari perwakilan Kabupaten Sampang. setelah pertemuan tersebut Inisiatif dari salah satu anggota Garbi untuk

⁴²<https://www.partaigelora.id> (diakses, 5 januari 2023)

membentuk sebuah partai politik yang bernama Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) konsolidasi awal proses di Jawa timur Surabaya pada 2 November 2019 untuk membahas persiapan membentuk sebuah partai.

Dengan hadirnya Partai Gelora Kabupaten Sampang pada 10 November 2019 yang di pimpin Sahrul Mukarrom sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Gelora Kabupaten Sampang dengan berjalanya waktu pengurus DPD telah mempunyai Sekretariat di jalan Rajawali No, 13 dan seiring berjalannya waktu pengurus DPD Partai Gelora Sampang tersebut membentuk Dewan Pengurus Kecamatan (DPC) dengan jumlah 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang dan pengurus anak cabang (PAC) untuk sementara masih terbentuk 74 Desa dengan jumlah 6 Lurah 180 Desa dengan jumlah anggota yang sudah terdaftar di sipol 1113 hingga saat ini.

2. Visi Misi, Tujuan dan Program

Visi Misi

Visi: Visi Partai ialah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, makmur dan menjadi bagian dari kepemimpinan dunia.⁴³

Misi:

- 1) Membangun masyarakat yang religius dan berpengetahuan.
- 2) Membangun pemerintahan efektif.
- 3) Mengembangkan kekuatan pertahanan nasional.

⁴³AD-ART- Partai Gelora BAB IV Pasal 9

- 4) Menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang mengedepankan inovasi sains dan teknologi.
- 5) Menumbuhkan dan pemeratakan ekonomi dengan mewujudkan sumber pertumbuhan ekonomi baru.
- 6) Mendorong pembangunan yang menopang kelestarian lingkungan.
- 7) Berperan aktif dalam kepemimpinan nasional dan internasional.

Partai bertujuan:

- 1) Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 5) Meningkatkan partisipasi politik anggota, relawan dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
- 6) Memperjuangkan cita-cita partai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 7) Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁴⁴

⁴⁴ AD-ART- Partai Gelora BAB V Pasal 11

Program

1) Pelatihan Anti Korupsi

kegiatan diklat Anti Korupsi, diharapkan dapat membentuk calon penyuluh antikorupsi yang kompeten & berdaya sesuai Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya Bidang Penyuluhan pada Jabatan kerja Penyuluh Antikorupsi.

2) Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Partai Gelora perlu memiliki program pemberdayaan ekonomi sebagai agenda penting membantu negara. Diharapkan bisa membantu memutar ekonomi dalam kondisi krisis. Seperti membantu mengembangkan UMKM secara masif.

3. Asas dan Jadi diri

Asas: Asas Partai adalah Pancasila dan berlandaskan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.⁴⁵

Jatidiri Partai adalah Islam, nasionalis, demokrasi, kemanusiaan dan kesejahteraan.⁴⁶

- 1) Islam sebagaimana yang dimaksud dalam jatidiri partai ini adalah nilai-nilai keislaman dalam perspektif kehidupan berbangsa, bernegara yang didasari oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai energi yang menyatukan tanah air dan rakyatnya, dengan menjunjung tinggi norma, etika,

⁴⁵ AD-ART- Partai Gelora BAB II Pasal 4

⁴⁶ AD-ART- Partai Gelora BAB II Pasal 5

serta kemanusiaan, dan penghormatan terhadap segenap agama yang ber-ketuhanan Yang Maha Esa.

- 2) Nasionalisme sebagaimana yang dimaksud dalam jatidiri partai ini adalah rasa cinta, setia dan semangat pembelaan terhadap tanah air, bangsa dan negara Indonesia maupun penghormatan kepada segenap warga negara dengan kemajemukannya, untuk menjaga dan memajukan peradaban bangsa, tanpa membedakan suku, agama, ras, serta golongan.
- 3) Demokrasi sebagaimana yang dimaksud dalam jatidiri partai ini adalah semangat untuk membangun pemerintahan dan peradaban Indonesia dengan penghormatan terhadap hak-hak warga negara dan nilai-nilai kebebasan, persamaan, keterbukaan, tanggung jawab serta penghargaan terhadap kebhinekaan.
- 4) Kemanusiaan sebagaimana yang dimaksud dalam jatidiri partai ini adalah semangat untuk meletakkan manusia dan sifat kemanusiaannya pada tempat yang mulia dan menjadi pijakan pelebagaan sikap partai dalam perumusan kebijakan negara.
- 5) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam jatidiri partai ini adalah semangat untuk mengelola bumi, air dan udara serta kekayaan alam yang terkandung di dalam negara Indonesia untuk digunakan sebesar-sebesarnya meningkatkan kemakmuran dan standar kualitas hidup rakyat, dengan mendorong etos kerja,

menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan dan kedermawanan menuju Indonesia yang makmur dan berdaulat.

4. Susunan Pengurus

Tabel 4.1

**Susunan Dewan Pengurus Daerah
Partai Gelora Indonesia Kabupaten Sampang Periode 2019 – 2024**

No.	Nama	Jabatan
1.	Abd. Muhlis	Ketua
2.	Junaidi	Sekretaris
3.	Sahrul Mukarrom	Bendahara
4.	Khoirul Anam	Ketua Bidang Pembinaan SDM
5.	Defi Yulianti	Ketua Bidang Perempuan
6.	Rita Sulistiani	Wakil Ketua Bidang Perempuan

Sumber: SK Partai Gelora Kabupaten Sampang

B. Konfigurasi Politik Lokal

1. Hasil Pileg 2019

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang di singkat DPRD adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan di Kabupaten Sampang, provinsi Jawa Timur, DPRD memiliki 45 anggota yang tersebar di 11 Partai Politik dengan perolehan suara mayoritas diraih oleh partai PKB, PPP, NasDem dan Gerindra.

Adapun Komposisi anggota DPRD Kabupaten Sampang Periode 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2**Perolehan kursi partai politik di DPRD Sampang Pemilu 2019-2024**

Partai Politik	Jumlah Kursi dalam Periode 2019- 2024
PKB	7
Gerindra	5
PDI-P	2
Golkar	4
NasDem	6
PKS	3
PPP	7
PAN	3
Hanura	2
Demokrat	5
PBB	1
Jumlah Anggota	45
Jumlah Partai	11

Sumber : KPUD Sampang

Sedangkan perolehan suara caleg terpilih pada setiap daerah pemilihan sebagai berikut :

Dapil 1 Kota Sampang, Pengarengan, Torjun

No.	Partai	Nama	Perolehan Suara
1	PKB	Ach. Heriyanto Shaleh	8,977
2	PDI-P	Iwan Effendi	9,811
3	Partai Golkar	M. Faisol Riyadi	11,098
4	Partai Nasdem	Rudi Kurniawan, A.Md.Gz	10,652
5	PKS	H. Lutfianto	6,651
6	PPP	Mohammad Farok	15,643
7	PAN	Nafasi	9,118
8	Partai Demokrat	R. Aulia Rahman,S.H	7,209

Dapil II Sreseh, Jrengik, Tambelangan

No.	Partai	Nama	Perolehan Suara
1	PKB	Mushaddaq Chalili, S.H	10,714
2	Partai Gerindra	DR. H. Fauzan Adima, S.H, Mkn.	10,986
3	Partai Golkar	Ubaidillah, M.si	9,278
4	Partai Nasdem	Moh. Fathurrosi	10,383
5	PPP	H. Muji	6,784
6	Partai Demokrat	Sri Rustiana, S.kep.	8,839

Dapil III Kedundung dan Robatal

No.	Partai	Nama	Perolehan Suara
1	PKB	Abdurohimi	7,345
2	Partai Gerindra	Alan Kaisan	11,542
3	Partai NasDem	Markanji	12,453
4	PPP	Moh. Iqbal Fathoni	8,303
5	PAN	Purwanto	9,252
6	Partai Hanura	Anton Haryono	8,989
7	Partai Demokrat	Kumala Puspita Hadi, S.E.	11,755

Dapil IV Ketapang dan Banyuates

No.	Partai	Nama	Perolehan Suara
1	PKB	H. Ali	14,869
2	Partai Gerindra	A. Hamiduddin	7,924
3	PDIP	Suhovil Mukarrom	10,423
4	Partai NasDem	Muhammad Nur Mutakim	10,133
5	PKS	Toipul Minan	14,673
6	PPP	Muhammad Subhan	6,864

7	Partai Hanura	Mohammad Far Far	10,970
8	Partai Demokrat	H. Abdus Salam	10,502

Dapil V Sokobenah dan Karang Penang

No.	Partai	Nama	Perolehan Suara
1	PKB	Fathul Qoribullah	11,480
2	PKB	Baihaki, S.Pd, M.Pd.	7,866
3	Partai Gerindra	Shohebus Sulton	6,972
4	Partai Golkar	M. Djaikun	9,718
5	PKS	Wafi	6,146
6	PPP	Dedi Dores	9,137
7	PPP	Hosni, S.H.I	7,940
8	Partai Demokrat	Nurul Huda,S.Sos	9,259

Dapil VI Camplong dan Omben

No.	Partai	Nama	Perolehan Suara
1	PKB	Fadol	18,327
2	Partai Gerindra	Amin Lubis	13,525
3	Partai Golkar	Moh Zachroni	10,867
4	Partai NasDem	Imam Hambali	17,121
5	Partai NasDem	Imam Hanafi	12,205
6	PPP	Amin Arif Tirtana, S,Ag. M.si	7,989
7	PAN	Moh Fauzan, S.H.	12,851
8	PBB	Agus Husnul Yakin, S.Ag.	8,008

Sumber : hasil pileg 2019 KPUD Sampang

Dari tabel diatas dapat kategorikan partai politik papan atas (partai besar) di Sampang adalah PKB (ketua DPRD), PPP (wakil ketua DPRD),

NasDem (wakil ketua DPRD), Gerindra (wakil ketua DPRD), Demokrat. Sedangkan partai papan tengah di Sampang adalah Golkar, PAN, PKS. Sedangkan partai papan bawah PDI-P, Hanura, PBB.

ada 5 parpol yang tidak memperoleh kursi, yaitu Partai Garuda, Partai Berkarya, Partai Perindo, PSI, dan PKPI⁴⁷

2. Hasil Pilkada 2018

Pemilihan umum merupakan sarana dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta 5 (lima) tahun sekali dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), namun setelah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disahkan maka rakyat dapat memilih kepala daerah secara langsung.

Setiap daerah menyelenggarakan Pilkada ketika menjelang akhir masa jabatan kepala daerah. Hal ini berlangsung hingga pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, maka Pilkada dilaksanakan secara serentak mulai tahun 2015, 2017, 2018, kemudian tahun 2019 dijadikan tahun pelaksanaan.

⁴⁷ <https://maduraindepth.com/ini-45-nama-anggota-dprd-terpilih-periode-2019-2024> (diakses, 26 maret 2023)

Provinsi Jawa Timur pada Pilkada tahun 2018 melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati/Walikota di 18 Kabupaten/Kota. Kabupaten Sampang merupakan salah satu daerah yang melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon yaitu H. Slamet Junaidi dan H. Abdullah Hidayat (nomor urut 1), Drh. H. Hermanto Subaidi, M.Si dan H. Suparto (nomor urut 2), serta H. Hisan, SE dan H. Abdullah, SE (nomor urut 3). Hasil pemungutan suara yang dilaksanakan serentak pada tanggal 27 Juni 2018 adalah sebagai berikut :⁴⁸

Tabel 4.3
Perolehan suara kandidat dalam pilkada Sampang tahun 2018

No	Uraian	Rincian														
		Banyuwates	Campung	Jrengik	Karanggenang	Kedungdung	Ketapang	Omben	Karangpenang	Robatal	Sampang	Sokobenh	Sreseh	Tambelangan	Torjun	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
1.	H. Slamet Junaidi dan H. Abdullah Hidayat	21.428	29.484	8.096	22.246	38.558	41.479	23.607	7.616	16.776	32.061	19.867	8.169	19.301	18.438	307.126
2.	DRH. H. Hermanto Subaidi, M.Si dan H. Suparto	23.944	19.047	12.750	24.563	24.611	15.696	23.773	4.968	20.798	22.212	26.511	7.451	14.008	5.436	245.768
3.	H. Hisan, SE dan H. Abdullah, SE	2.314	1.640	248	2.421	1.188	1.026	3.800	346	1.282	5.638	1.459	270	2.088	1.026	24.746
E.	Jumlah Seluruh Suara Sah	47.686	50.171	21.094	49.230	64.357	58.201	51.180	12.930	38.856	59.911	47.837	15.890	35.397	24.900	577.640
F.	Jumlah Suara tidak Sah	969	770	369	906	1.041	752	808	135	514	837	951	244	588	298	9.177
G.	Jumlah Seluruh Suara Sah dan tidak Sah (E+F)	48.650	50.941	21.463	50.136	65.398	58.988	51.988	13.065	39.370	60.748	48.788	16.134	35.985	25.198	586.817

Sumber : KPU Sampang Hasil pilkada 2018

⁴⁸Dina Lestari, "Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Di Sampang Tahun 2018", *Jurnal Politik Indonesia* Vol.05 No.02, 2019

C. Strategi Partai Gelora Lolos Verifikasi Peserta Pemilu 2024

Pemilihan umum menurut UU Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁹

Partai politik yang ingin mengikuti pemilu adalah partai politik yang telah memiliki badan hukum tetap yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Ham RI. Sebuah partai untuk dapat mengikuti pemilu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dan beberapa tahapan yang harus dijalani Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pasal 173 bahwa untuk menjadi peserta Pemilu sebuah partai politik harus berbadan hukum, memiliki kepengurusan diseluruh Provinsi, memiliki kepengurusan di 75% Kab/Kota di Provinsi, memiliki kepengurusan 50% kecamatan di Kab/Kota, menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan didalam kepengurusan, memiliki anggota paling sedikit 1.000 atau 1/1.000 dari jumlah penduduk, memiliki kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat pusat provinsi hingga kota, mengajukan nama, lambang, dan tanda Parpol ke KPU, menyerahkan nomor rekening atas nama partai. Ada tahapan

⁴⁹Undang-undang No.7 tahun 2017

pengisian SIPOL sebelum mendaftar dan ada tahapan proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.⁵⁰

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Affan Gaffar⁵¹ salah satu indikator sebuah negara demokrasi adalah dilaksanakan pemilihan umum yang bersifat reguler, maka salah satunya adalah dengan adanya verifikasi partai politik disetiap pemilu.

Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, dengan adanya verifikasi yang dijalankan berarti salah satu syarat untuk menjadi partai peserta pemilu telah dilaksanakan oleh partai politik tersebut. KPUD Sampang juga telah menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang independent bagaimanapun juga proses verifikasi partai politik dianggap penting dikarenakan dinamika politik di daerah berubah sangat cepat dan dinamis seperti yang diungkapkan ibu siti aisyah selaku Komisioner KPUD Sampang:

“Komisioner KPU Kabupaten Sampang bahwa verifikasi merupakan pemeriksaan terhadap kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PKPU No. 4 pasal 1 ayat 22 Tahun 2022. Untuk dapat mengikuti proses pemilu ada dua tahap verifikasi yang harus dilalui oleh sebuah partai politik, yaitu; 1) verifikasi oleh kemenkumham untuk mendapatkan legalitas sebagai partai politik yang berbadan hukum tetap. 2) verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU untuk menentukan partai politik peserta pemilu”.⁵²

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 173

⁵¹ Gaffar Afan, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2002), 7.

⁵² Wawancara dengan siti aisyah di kantor KPUD Sampang , 24 januari 2023

Demikian partai gelora kabupaten sampang telah memenuhi persyaratan dengan beberapa tahapan yakni verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, pada 2019 partai gelora sudah mendapatkan SK kemenkumham secara ligitas sebagai suatu partai politik baru.

Dalam hal ini strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan, akan tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan dan hanya menunjukkan arah usaha, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Menurut Robbins planing mode menjelaskan bahwa strategi sebagai sebuah model perencanaan atau kumpulan pedoman eksplisit yang dikembangkan sebelumnya. Para pimpinan parpol mengidentifikasi arah tujuan mereka.kemudian mengembangkan rencana yang sistematis dan terstruktur untuk mencapai hal itu, Seperti yang diungkapkan abd muhlis Ketua DPD Partai Gelora Sampang:

“Dalam rangka menghadapi verifikasi partai politik peserta pemilu partai Gelora telah menyiapkan strategi yang sistematis dan terstruktur yang disusun oleh pengurus DPD partai Gelora Kabupaten Sampang yaitu dengan membentuk struktur kepengurusan diseluruh tingkat kecamatan dan melakukan koordinasi dengan Dewan pengurus cabang untuk membentuk kepengurusan partai di tingkat perdesaan yang ada di Kabupaten Sampang. Menjalin hubungan yang baik dan intensif dengan lembaga/instansi penyelenggara pemilu juga menjadi salah satu strategi yang digunakan oleh partai Gelora dalam hal kemudahan informasi yang didapat. Hal ini menjadi fokus utama bagi partai Gelora DPD Kabupaten Sampang untuk dapat lolos menjadi partai politik yang akan ikut didalam peserta pemilu tahun 2024 dengan harapan dapat menjadi salah satu pemenang pada pemilu mendatang.”⁵³

⁵³ Wawancara dengan abd muhlis di sekretariat partai Gelora Sampang, 5 januari 2023

Partai Gelora sebagai partai baru memiliki semangat dan obsesi yang tinggi menjadi partai politik peserta pemilu 2024, sejumlah strategi yang digunakan lolos verifikasi sebagai berikut:

1. Strategi Rekrutmen Pengurus DPD & DPC Partai Gelora Kabupaten Sampang

Dalam perekrutan kepengurusan Partai Gelora perlu mendapatkan perhatian khusus karena untuk menciptakan pengurus yang berkualitas perlu untuk mendapatkan anggota dan pengurus yang berkualitas serta menjaga keberlangsungan hidup partai dimasyarakat.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gelora Kabupaten Sampang merupakan salah satu bagian dari rangkaian sistem yang berada di bawah sistem politik nasional. Dalam rangka tersebut pengurus DPD Partai Gelora Kabupaten Sampang harus diisi orang-orang yang berbakat di bidangnya khususnya di bidang politik. Selain memiliki keahlian dalam bidang politik kriteria untuk menjadi pengurus adalah mereka yang memiliki pengalaman berorganisasi dan diharapkan memiliki sumber daya manusia yang mumpuni untuk menduduki jabatan dalam partai anggota harus menjalani masa pengkaderan yang ditentukan oleh partai.

Selama masa pelatihan ini dapat dilihat anggota mana yang dapat dijadikan pengurus harian. Dalam Partai Gelora untuk menjadi seorang pengurus partai dapat dilakukan dengan cara ditunjuk atau melalui

musyawarah. Sistem penunjukkan ini dapat terjadi ketika dari masing-masing kedua belah pihak sama-sama menyetujui untuk dijadikan pengurus partai.

Dalam proses rekrutmen harus berdasarkan kriteria dan syarat yang ditentukan yang dimana dalam partai politik memiliki ketentuan syarat dan kriteria yang berbeda-beda mengenai sistem penunjukan dan pengangkatan untuk menduduki jabatan dalam partai politik sehingga adanya tahapan yang harus dilalui yaitu pengkaderan.

Dalam Partai Gelora untuk menjadi seorang pengurus partai dapat dilakukan dengan cara ditunjuk atau melalui musyawarah. Sistem penunjukkan ini dapat terjadi ketika dari masing-masing kedua belah pihak sama-sama menyetujui untuk dijadikan pengurus partai.

Rekrutmen politik secara umum dapat diartikan sebagai pelatihan, training dan persiapan kepemimpinan terbuka untuk masyarakat, penampilan badan legislatif pemerintahan dan fungsi-fungsi lain anggota partai dan juga kompetensi dalam pemilihan.⁵⁴ Partai Gelora dalam merekrut anggotanya tidak memiliki kriteria dan tahapan khusus bagi para anggota partai.

Strategi politik adalah gerak yang mendorong terjadinya perubahansikap perilaku yang dilakukan secara sengaja yang kemudian memberikan warna dan perubahan pada pemerintahan. Strategi tersebut

⁵⁴Amal, Ichlasus, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana 1996), 28.

muncul karena desakan kebutuhan internal dan eksternal partai sebagai kelompok yang terorganisir dan merupakan dampak dari interaksi masyarakat. Adanya strategi politik menyebabkan suatu institusi politik melakukan terobosan-terobosan politik dalam menjalankan aktivitas politiknya.

Adanya strategi politik sebagai akibat dari perubahan politik yang terjadi baik dalam internal maupun eksternal partai Gelora Kabupaten Sampang, antara lain dilakukan melalui dijalankannya beberapa fungsi partai politik, yaitu melalui sarana komunikasi politik.

Rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksi rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan dan ujian. Peran dan fungsi partai politik tersebut juga secara detail dijelaskan oleh Ramlan Surbakti.⁵⁵ Dimana partai politik mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat agar mau berpartisipasi dalam proses politik melalui organisasi-organisasi massa yang melibatkan golongan-golongan tertentu, seperti golongan buruh, petani, pemuda dan sebagainya.

Strategi yang dilakukan DPD Partai Gelora Kabupaten Sampang yakni melalui perkumpulan organisasi-organisasi seperti pemuda, agar pemuda saat ini sadar akan politik.

⁵⁵ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), 189

“Kita memiliki model KTA, disamping direncanakan sendiri itu kita nanti memiliki sistem tersendiri yakni rekrutmen internal dan eksternal, yang internal kan dari pengurus, anggota dan kader, kadang dari saudara, keluarga, teman, kalau dari eksternal tim kita akan menjangkau pada tempat yang strategis seperti di warkop, dan perkumpulan-perkumpulan”.⁵⁶

Proses rekrutmen merupakan fungsi mencari dan mengajak orang-orang yang memiliki kemampuan untuk turut aktif dalam kegiatan politik, yaitu dengan cara menempuh berbagai proses penjangkauan. Implementasi rekrutmen politik mencakup rekrutmen anggota, rekrutmen pengurus, rekrutmen calon anggota legislatif, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Adapun sistem rekrutmen yang dipakai oleh Partai Gelora Kabupaten Sampang dibagi menjadi dua, pertama sistem rekrutmen untuk pengurus dan yang kedua sistem rekrutmen untuk anggota. Dalam melakukan strategi rekrutmen, partai politik seharusnya dapat menghasilkan orang-orang yang berkualitas di masyarakat, karena nantinya kader-kader partai adalah orang yang bertanggung jawab sebagai penggerak partai dan juga kader-kader ini akan dipersiapkan sebagai pemimpin selanjutnya yang duduk di pemerintahan.⁵⁷

Adapun strategi rekrutmen pengurus Partai Gelora Kabupaten Sampang yang digunakan sebagai berikut :

⁵⁶ Wawancara dengan abd muhlis di sekretariat partai Gelora Sampang, 5 januari 2023

⁵⁷ Agus Pramono, *Elite Politik yang Loyo, dan Harapan Masa Depan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), 30.

a. Strategi Rekrutmen berbasis Jaringan Organisasi

Dari hasil data yang diperoleh dalam penelitian ini, secara umum strategi rekrutmen pengurus berbasis Jaringan organisasi terjadi di partai Gelora Kabupaten Sampang untuk melakukan rekrutmen secara tertutup. Dalam hal ini Partai Gelora Kabupaten Sampang menggunakan strategi rekrutmen berbasis jaringan organisasi yaitu dengan komunikasi dapat memberikan semua informasi.

Adapun rekrutmen yang berbasis Jaringan organisasi merupakan suatu hubungan dengan satu sama lain, di dalam suatu organisasi ataupun partai politik pun juga terdapat sebuah jaringan seperti halnya di organisasi atau partai politik lainnya, yang bisa di rekrut dalam organisasi yang mana akan lebih mudah untuk bergabung atau di rekrut dalam partai politik karena sudah memiliki suatu ikatan dan hubungan satu sama lain.

Hasil data yang diperoleh dalam penelitian ini, Pada dasarnya secara umum rekrutmen berbasis jaringan organisasi sering dilakukan sebagai strategi Partai Politik, dalam hal tersebut peneliti menemukan strategi yang dilakukan oleh Partai Gelora Kabupaten Sampang telah melakukan strategi rekrutmen pengurus berbasis jaringan organisasi misal sebelum adanya Partai Gelora salah satu pernah ada di ormas Garbi,

PKS, Gerindra, saat ini telah menjadi pengurus partai Gelora di tingkat DPD sehingga bisa mengajak mantan pengurus partai lain untuk di jadikan pengurus dengan cara melalui rekrutmen berbasis komunikasi.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Abd Muhlis Ketua DPD Kabupaten Sampang:

“kami memang untuk melakukan rekrutmen pengurus DPD dan DPC secara tertutup artinya tidak terbuka seperti melayangkan pamflet atau formulir online (*from*) mas. Tapi mas kami untuk merekrut dengan strategi berbasis jaringan organisasi mas sehingga yang kami lakukan dengan cara berkomunikasi agar lebih mudah untuk bergabung, sebagian pengurus kebetulan juga dari ormas Garbi contohnya saya sendiri, saya dulu berada di Garbi dan mempunyai suatu jaringan organisasi, sehingga saya mengajak teman lewat jaringan atau hubungan dalam organisasi untuk bergabung dan berjuang mas.”⁵⁸

Dalam hal ini partai Gelora Kabupaten Sampang berusaha mewujudkan strategi rekrutmen berbasis jaringan organisasi secara berkomunikasi atau hubungan yang lebih mudah untuk di ajak bergabung dengan memberikan penjelasan mengenai arah atau tujuan partai Gelora.

Pernyataan tersebut di ungkapkan oleh Sahrul Mukarrom DPD Kabupaten Sampang:

“Kami untuk merekrut pengurus dengan basis jaringan organisasi mas, sebelum partai gelora terbentuk, kami mempunyai basis jaringan organisasi atau ormas garbi lintas jatim untuk deklarasi sebuah partai gelora dan setelah rapat itu kami mendapatkan intruksi dari DPW Garbi jatim untuk membentuk pengurus DPD Partai Gelora Kabupaten

⁵⁸ Wawancara dengan abd muhlis di sekretariat partai Gelora Sampang, 1 april 2023

Sampang. Semenjak itu kami segera membentuk dan mengajak atau merekrut yang ada di Garbi⁵⁹

Ketika melakukan suatu komunikasi dengan organisasi lain maka terbangunlah suatu hubungan, sebagian dari hubungan itu merupakan jaringan yang mencakup terdapat di dalam struktur organisasi (*formal network*) ataupun di luar struktur organisasi (*non formal network*) semisalnya interaksi yang terjadi antara pengurus dan anggota.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Abd Muhlis Ketua DPD Kabupaten Sampang:

“Kami mas, membangun hubungan komunikasi dari dalam ataupun luar struktur kepengurusan organisasi agar kita bisa membangun pola komunikasi baik, apalagi untuk merekrut pengurus berbasis jaringan organisasi mas, kita perlu strategi ini mas, kami memang mempunyai beberapa strategi untuk roda perjuangan ini mas, kami mas sudah merekrut untuk jadi pengurus DPD dan DPC Partai Gelora Kabupaten Sampang dari sebagian berlatar dari ormas Garbi mas.”⁶⁰

Rekrutmen berbasis jaringan organisasi sering dilakukan sebagai strategi untuk merekrut pengurus karena ada suatu hubungan yang telah di bangun sebelumnya misalkan yang terjadi di Partai Gelora sebagian yang di rekrut jadi pengurus atas dasar basis jaringan organisasi yaitu dari Ormas Garbi yang terbentuk pada saat komunikasi secara langsung setelah mendapat intruksi untuk mendeklarasikan Partai Gelora. Sehingga merekrut pengurus dari jaringan organisasi tersebut,

⁵⁹ Wawancara dengan Sahrul Mukarrom di sekretariat partai Gelora Sampang, 6 Januari 2023

⁶⁰ Wawancara dengan abd muhlis di sekretariat partai Gelora Sampang, 1 april 2023

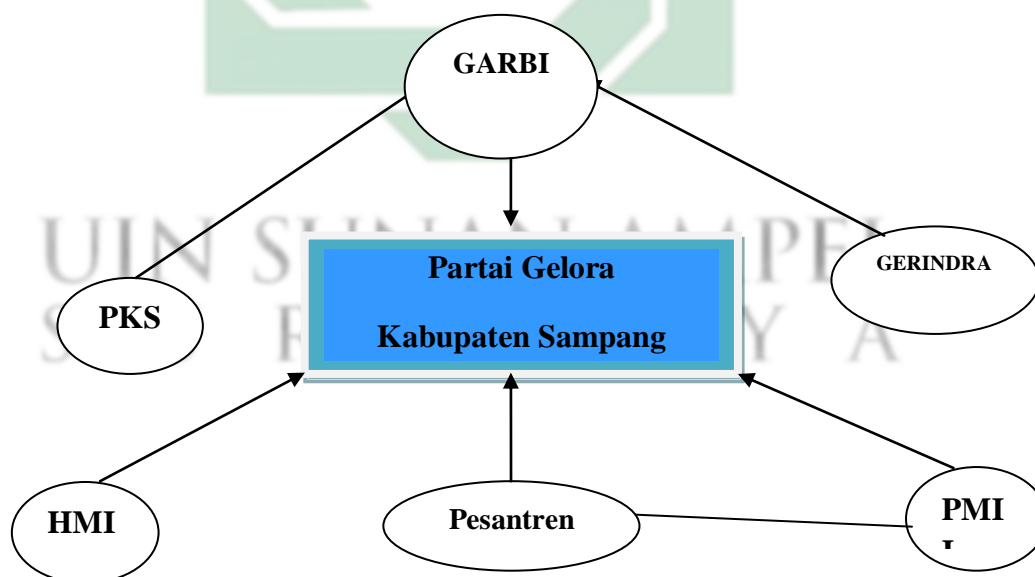
lebih efektif dan mudah untuk di rekrut untuk membangun hubungan yang sangat penting dalam keterkaitan di suatu kepengurusan.

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Sahrul Mukarrom DPD Kabupaten Sampang:

“Ada persamaan backround organisasi, misalkan ormas Garbi mas, jaringan ini sangat menentukan untuk merekrut, karena sudah ada hubungan pertemanan sebelumnya, jadi tidak canggung untuk mengajaknya masuk Partai Gelora Kabupaten Sampang.”⁶¹

Adapun skema dalam rekrutmen pengurus strategi berbasis jaringan organisasi terdapat pada Partai Gelora Kabupaten Sampang ;

Gambar 4.1
Skema Strategi Rekrutmen berbasis Jaringan organisasi



⁶¹ Wawancara dengan Sahrul Mukarrom di sekretariat partai Gelora Sampang, 6 Januari 2023

Strategi Rekrutmen berbasis jaringan organisasi yang digunakan Partai Gelora Kabupaten Sampang yaitu dengan komunikasi secara langsung. Strategi berbasis jaringan organisasi bersifat tertutup tidak terbuka dan sangat berpengaruh dalam proses perjalanan Partai Politik nantinya. Pada skema di atas terdapat latar atau geografi pengurus merupakan poin penting dalam merekrut atau mengajak dan bergabung untuk proses di Partai Politik.

Awal mula penggalan Partai Gelora Kabupaten Sampang oleh sahrul mukarrom mantan kader dari Partai PKS dan di sambung oleh abdul muhlis mantan kader dari Partai Gerindra keduanya bertemu dalam wadah Garbi yang mana di amanahkan untuk membentuk struktural kepengurusan Partai Gelora Kabupaten Sampang dengan strategi rekrutmen berbasis jaringan organisasi sangat membatu dalam rekrutmen pengurus dan lebih optimal untuk mengajak dan bergabung dari lewat jaringan organisasi mulai dari PMII, HMI dan pondok pesantren untuk di jadikan pengurus DPD hingga DPC Partai Gelora Kabupaten Sampang.

Pada pembahasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa Partai Gelora menggunakan Strategi berbasis jaringan organisasi dalam rekrutmen pengurus DPD, dengan cara melalui komunikasi langsung agar mudah bergabung karena pastinya

sudah mempunyai emosional yang cukup dan mempunya jiwa organisasi.

b. Strategi Rekrutmen berbasis kesamaan visi, misi, program perjuangan

Dari hasil data yang diperoleh dalam penelitian ini, secara umum strategi rekrutmen pengurus berbasis Kesamaan visi, misi dan program perjuangan terjadi di Partai Gelora Kabupaten Sampang. Dalam hal ini Partai Gelora Kabupaten Sampang menggunakan strategi rekrutmen berbasis Kesamaan visi, misi dan program perjuangan untuk merekrut pengurus yang se arah atau kesesuaian dalam roda kepengurusan partai politik.

Rekrutmen berbasis Kesamaan visi, misi dan program perjuangan merupakan sesuatu yang cenderung akan di pandang sebagai satu objek yang akan saling memiliki karena telah mendapatkan kesesuaian dalam arah tujuan perjalanan partai politik.

Pada penelitian ini yang akan di tekankan adalah mengenai Strategi rekrutmen berbasis Kesamaan visi, misi dan program perjuangan Partai Gelora Kabupaten Sampang.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Abd Muhlis Ketua DPD Kabupaten Sampang:

“ kami mas, memang mempunyai strategi untuk dijadikan alat yang mana harus serba mudah dan pastinya efektif, salah satunya

strategi berbasis kesamaan visi, misi dan program perjuangan, nah ini kami terapkan untuk merekrut pengurus karena dengan adanya strategi ini kami lebih se arah karena kita mempunyai keasamaan untuk menjalankan roda partai politik.”⁶²

Aspek yang terjadi pada strategi Kesamaan visi, misi dan program perjuangan ini di karenakan terbentuk dalam suatu hubungan yang memiliki kesamaan seperti :

a. Saling menyediakan dukungan emosional

Dengan adanya dukungan secara emosional dapat membentuk suatu hubungan yang positif dan efektif untuk menjalankan tugas dari kesamaan visi, misi dan program perjuangan di Partai Gelora Kabupaten Sampang.

b. Memiliki kesamaan visi, misi dan program perjuangan

Dalam suatu kepengurusan Partai Gelora Kabupaten Sampang memiliki kesamaan merupakan suatu kekuatan dalam membentuk komunikasi dan arah tujuan yang di inginkan oleh Partai Gelora Kabupaten Sampang.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh abd muhlis Ketua

DPD Kabupaten Sampang:

“ iya mas sesuai dengan apa yang kami katakan di atas dengan strategi ini kami bisa mempunyai hubungan yang terbentuk karena adanya kesamaan jadi kami lebih optimal untuk menjalankan perjalanan perpolitikan, namun semua itu adanya dukungan emosional yang positif dan untuk merekrut pengurus

⁶² Wawancara dengan abd muhlis di sekretariat partai Gelora Sampang, 1 april 2023

dengan strategi berbasis kesamaan visi, misi dan program perjuangan sangatlah efektif mas.”⁶³

Faktor yang mempengaruhi Strategi rekrutmen berbasis kesamaan visi, misi dan program perjuangan seperti halnya ;

a. Kebutuhan dan tujuan yang sama

Dalam hal ini, Strategi dapat memberikan dampak kekompakan untuk merekrut pengurus dan bisa saling berjuang dalam perjalanan tujuan partai politik, sehingga pengurus Partai Gelora Kabupaten Sampang bekerjasama untuk mendapatkan kebutuhan dan tujuan dengan cara menguatkan Kesamaan visi, misi dan program perjuangan yang di harapkan.

b. Kepentingan

Dengan adanya dasar utama untuk merekrut pengurus adalah kesamaan kepentingan yang harus memiliki visi, misi dan program perjuangan demi mencapai kepentingan yang sama. sehingga Partai Gelora bisa mengoptimalkan dengan baik dalam kesamaan kepentingan.

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Sahrul Mukarrom

DPD Kabupaten Sampang:

“betul mas apa yang di katakan pak muslis, strategi ini juga dapat mempermudah perjalanan partai politik sehingga kita tinggal menjalankan dengan betul-betul. Kesamaan visi misi dan program perjuangan partai politik sebagai mestinya. Sehingga

⁶³ Wawancara dengan abd muhlis di sekretariat partai Gelora Sampang, 1 april 2023

berpotensi kuat atas kesesuaian dalam menjalankan tugas tersebut dengan merekrut pengurus berbasis kesamaan visi, misi dan program perjuangan.⁶⁴

Adapun kesamaan visi, misi dan program perjuangan pada Partai Gelora Kabupaten Sampang seperti :

Visi : mewujudkan indonesia yang berdaulat, adil, makmur dan menjadi bagian kepemimpinan dunia.

Misi : Membangun pemerintahan efektif serta menumbuhkan dan pemeratakan ekonomi dengan mewujudkan sumber pertumbuhan ekonomi baru,

Program perjuangan : Pemberdayaan ekonomi rakyat,

Sesuai dengan tujuan Partai Gelora Kabupaten Sampang yakni mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia serta memperjuangkan cita-cita partai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pada pembahasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa Partai Gelora Kabupaten Sampang menggunakan Strategi berbasis Kesamaan visi, misi dan program perjuangan untuk merekrutmen pengurus, dengan adanya memiliki kesamaan, dukungan emosional, kebutuhan yang sama serta kepentingan dapat lebih mudah dalam menjalankan tujuan kesamaan tersebut. Sehingga perjalanan dalam perpolitikan berjalan dengan optimal.

⁶⁴ Wawancara dengan Sahrul Mukarrom di sekretariat partai Gelora Sampang, 6 Januari 2023

c. Strategi Rekrutmen berbasis Pertemanan

Dari hasil data yang diperoleh dalam penelitian ini, secara umum strategi rekrutmen pengurus berbasis pertemanan terjadi di partai Gelora Kabupaten Sampang untuk melakukan rekrutmen secara tertutup. Dalam hal ini Partai Gelora Kabupaten Sampang menggunakan strategi rekrutmen berbasis pertemanan yaitu bertatap muka secara langsung (*face to face*) dapat memberikan semua informasi baik secara lisan yang dapat dibagi ketika dua orang atau lebih hadir secara fisik dan komunikasi.

Pada hal ini peneliti menemukan suatu Strategi berbasis pertemanan yang di gunakan oleh Partai Gelora Kabupaten Sampang dalam melakukan rekrutmen pengurus DPC karena adanya hubungan pertemanan, sehingga lebih mudah untuk di rekrut. Ada juga karena berasal dari satu desa atau satu ormas yakni Gerakan arah baru (Garbi). Sehingga mereka mudah melakukan rekrutmen, karena sudah ada hubungan pertemanan dalam merekrut pengurus.

Di sisi yang lain, mempunyai jiwa kepemimpinan, organisasi serta mampu berkomunikasi, sehingga ketika orang tersebut berbincang-bincang dengan orang yang melakukan rekrutmen, mereka bersedia direkrut untuk menjadi pengurus DPC Partai Gelora Kabupaten Sampang.

Sementara itu Partai Gelora merupakan partai baru sehingga sangat penting jika menggunakan dengan cara *face to face* dalam merekrut pengurus seperti ketua, sekretaris dan bendahara. Dalam hal ini, Partai Gelora melakukan suatu Strategi berbasis pertemanan dalam merekrut untuk dijadikan pengurus dengan cara *Face to Face*, agar lebih mudah untuk di rekrut dan bergabung dengan Partai Gelora Kabupaten Sampang.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Abd Muhlis Ketua DPD Kabupaten Sampang:

“kami memang untuk melakukan rekrutmen pengurus DPC memang tidak terbuka secara langsung tapi secara tertutup. Tapi mas kami melakukan secara tertutup dengan strategi berbasis pertemanan mas sehingga yang kami lakukan dengan *face to face* agar lebih mudah untuk bergabung, sebagian pengurus terdapat dari berasal satu desa dan juga dari ormas Garbi contohnya saya sendiri, saya dulu berada di Garbi dan mempunyai teman perjuang setelah itu saya mendapatkan mandat dari DPW untuk membentuk suatu kepengurusan di DPD Partai Gelora Kabupaten Sampang, sehingga saya mengajak teman untuk bergabung dan berjuang mas, kami atas pertemanan keteman saat memilih pengurus tidak ada kerabat.”⁶⁵

Dalam hal ini partai Gelora Kabupaten Sampang berusaha mewujudkan strategi rekrutmen berbasis pertemanan secara temen ke temen dengan cara langsung (*face to face*) dengan memberikan pengetahuan luas tentang politik serta melakukan diskusi dengan teman yang lainya.

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Sahrul Mukarrom DPD Kabupaten Sampang:

⁶⁵ Wawancara dengan abd muhlis di sekretariat partai Gelora Sampang, 1 april 2023

“ Kami untuk merekrut pengurus dengan secara *face to face* dengan menjelaskan mengenai Partai Gelora, tujuan, visi, dan misi ataupun yang bersangkutan dengan Partai Gelora, karena kami menggunakan strategi berbasis pertemanan sehingga lebih efektif dan mudah dan kami ajak untuk bergabung dan berjuang bersama-sama, untuk dari kami sendiri tidak pilih pilih yang penting mempunyai jiwa kepemimpinan, solidaritas, dan mau berjuang bersama kami secara emosional.”⁶⁶

Jadi Strategi yang dilakukan oleh Partai Gelora Kabupaten Sampang untuk merekrut pengurus adalah menggunakan dengan hubungan pertemanan. Dalam hal ini Partai Gelora Kabupaten Sampang melakukan rekrutmen Pengurus karena adanya hubungan emosional, baik itu pertemanan.

Peneliti menemukan cara merekrutmen yang dilakukan oleh Partai Gelora Kabupaten Sampang melalui :

Partai Gelora Kabupaten Sampang melakukan perekrutan melalui perkenalan antara pengurus DPD dan calon pengurus DPC Partai Gelora kabupaten Sampang, seperti memperkenalkan identitas diri masing-masing ketika dirumah ataupun bisa diluar rumah. Ketika satu sama lain saling mengenal, maka perekrut mudah memperkenalkan Partai Gelora pada calon pengurus.

Sebagaiman yang diungkapkan oleh Abd Muhlis Ketua DPD Partai Gelora Kabupaten Sampang :

“Kalau berbica strategi mungkin hampir sama ya mas dengan partai politik lain yang ada di Kabupaten Sampang, Karena kami memang lebih mendekati pada hubungan emosional atau pertemanan. Dan kalau kami kenal kan lebih mudah mengajak

⁶⁶ Wawancara dengan Sahrul Mukarrom di sekretariat partai Gelora Sampang, 6 Januari 2023

mereka, tentunya dengan menjelaskan mengenai Partai Gelora Kabupaten Sampang.”⁶⁷

Penyataan tersebut diungkapkan oleh junaidi DPD Partai Gelora

Kabupaten Sampang :

“kalau kami dari pendekatan emosional, kita bertemu secara langsung bersifat tertutup (*privat face to face*) dan menjelaskan mengenai Partai Gelora, seperti tujuan, visi dan misi dan yang berkaitan dengan tugas pokok di Partai Gelora, pada akhirnya kalau sudah mengenal akan lebih mudah untuk di rekrut.”

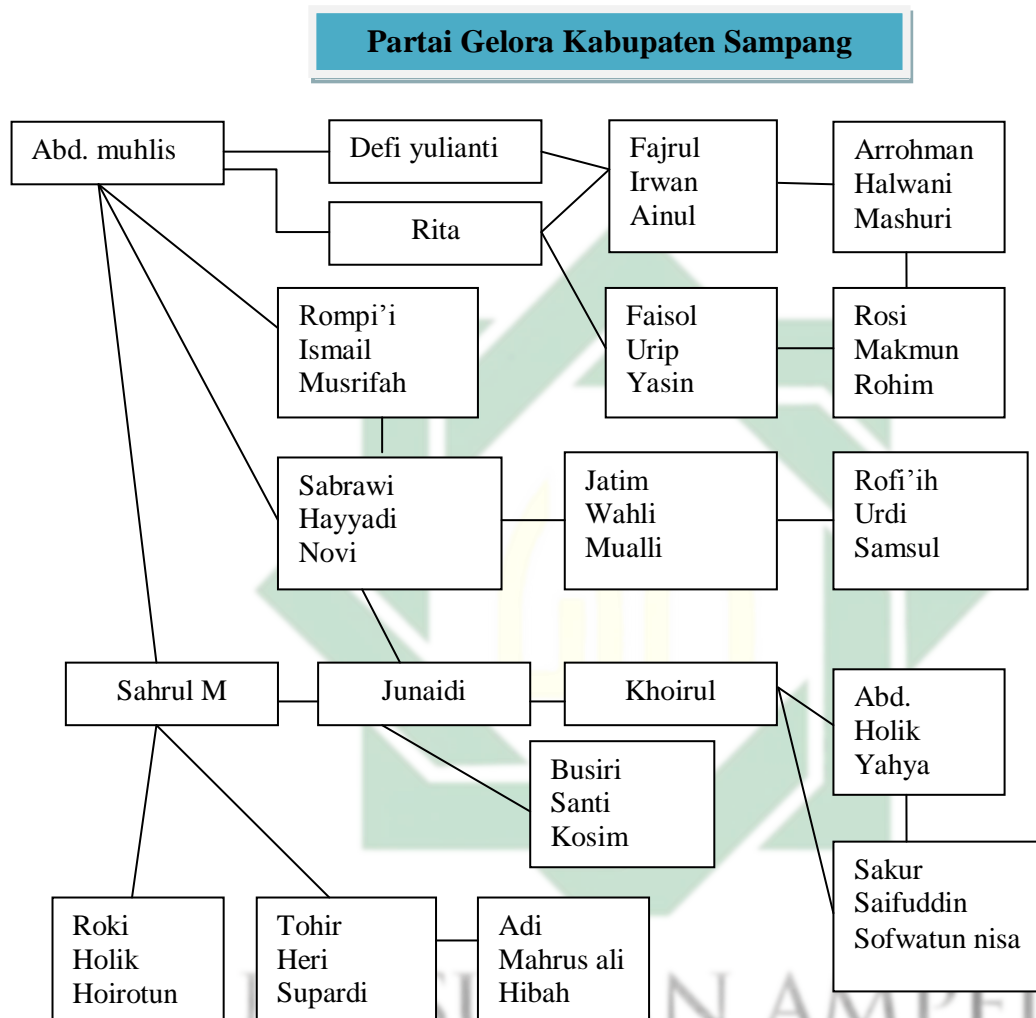
Jadi Pengurus Partai Gelora Kabupaten Sampang meyakini bahwa adanya rekrutmen dengan cara basis pertemanan dianggap efektif, efisien dan maksimal, secara emosional akan bertahan lama. karena adanya ikatan emosional yang telah dibangun.

Adapun skema sistem rekrutmen berbasis pertemanan yang digunakan oleh Partai Gelora Kabupaten Sampang ;

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶⁷ Wawancara dengan abd muhli di sekretariat partai Gelora Sampang, 5 Januari 2023

Gambar 4.2
Skema Strategi Rekrutmen Berbasis Pertemanan



Strategi rekrutmen berbasis pertemanan yang digunakan Partai Gelora Kabupaten Sampang dengan bertemu langsung. Strategi ini merupakan strategi yang sangat membantu untuk bergabung pada partai politik.

Terdapat pada skema di atas peneliti ingin memudahkan atas apa yang dilakukan oleh Partai Gelora Kabupaten Sampang untuk merekrut pengurus dalam berbasis pertemanan pada skema di atas oleh bapak

muhlis bahwa bapak muhlis mempunyai teman atau kenalan yang bernama defi dan rita yang keduanya adalah pengurus DPD. Saat ini pada alur skema ini bisa terjadi karena sebelumnya sudah mengenal atau kenal seperti kenal karena satu desa ke desa yang lain hingga kecamatan. Sehingga lebih cepat dan mudah untuk mengajak dan merekrut dalam proses di Partai Gelora Kabupaten Sampang.

Pada pembahasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa Partai Gelora menggunakan Strategi berbasis pertemanan dalam rekrutmen pengurus DPD dan DPC Partai Gelora Kabupaten Sampang dengan cara bertemu langsung (*face to face*) secara tertutup untuk dijadikan pengurus. Sehingga lebih mudah untuk rekrut ataupun bergabung karena pastinya sudah mempunyai ikatan emosional.

Gambar 4.3
Skema Strategi Rekrutmen Pengurus DPD & DPC Partai Gelora Kabupaten Sampang



Daftar Pengurus DPD Partai Gelora Kabupaten Sampang⁶⁸

Ketua : Abd. Muhlis

Sekretaris : Junaidi

Bendahara : Sahrul Mukarrom

Ketua Bidang Pembinaan SDM : Khoirul Anam

Ketua Bidang Perempuan : Defi Yulianti

Wakil Ketua Bidang Perempuan : Rita Sulistiana

Daftar Pengurus DPC Partai Gelora Se-Kabupaten Sampang⁶⁹

❖ Kecamatan Camplong

Ketua : Sabrawi

Sekretaris : Achmad Zayyadi

Bendahara : Novi Yanti

❖ Kecamatan Karang Penang

Ketua : Jatim

Sekretaris : Wahli

Bendahara : Moalli

❖ Kecamatan Kedundung

Ketua : Abd. Roqi

Sekretaris : Abd Kholik

Bendahara : Khoirotun

⁶⁸SK kepengurusan DPD Partai Gelora Kabupaten Sampang 2019-2024

⁶⁹SK kepengurusan DPC Partai Gelora Kabupaten Sampang

❖ Kecamatan Ketapang

Ketua : Abdus Sakur

Sekretaris : Muhammad Syaifuddin

Bendahara : Sofwatun Nisa'

❖ Kecamatan Omben

Ketua : Moch. Rompi'i

Sekretaris : Ismail Yamani

Bendahara : Musrifah Toher

❖ Kecamatan Robatal

Ketua : Rofi'i

Sekretaris : Ach Kurdi

Bendahara : Syamsul Arifin

❖ Kecamatan Sampang

Ketua : A Fajrul Falah

Sekretaris : Irwan Wahyudi

Bendahara : Ainol fakih

❖ Kecamatan Sokobanah

Ketua : Busiri

Sekretaris : Santi

Bendahara : Kosim

❖ Kecamatan Sreseh

Ketua : Arrohman

Sekretaris : Ahmad Halwani

Bendahara : Mashuri Yanto

❖ Kecamatan Torjun

Ketua : Moh. Tohir

Sekretaris : Heri Sugianto

Bendahara : Supardi

❖ Kecamatan Banyuates

Ketua : Abdul Holik Ali Huda

Sekretaris : Yahya

Bendahara : Fitria

❖ Kecamatan Pengarengan

Ketua : Faisol

Sekretaris : Moh Urip

Bendahara : Moh Yasin

❖ Kecamatan Tambelangan

Ketua : Moh Rosi

Sekretaris : Makmun

Bendahara : Abd Rohim

❖ Kecamatan Jrengik

Ketua : Adi

Sekretaris : Mahrus Ali

Bendahara : Hibah

2. Strategi Rekrutmen Anggota DPD Partai Gelora Kabupaten Sampang

Adapun beberapa strategi rekrutmen anggota partai Gelora Kabupaten Sampang yang digunakan sebagai berikut :

a. Strategi Ofensif (Menambah)

Strategi ofensif adalah strategi memperluas atau menambah dan menembus pasar. Dalam strategi ofensif yang di gunakan untuk menerapkan politik, yang sangat dibutuhkan, misalnya suatu partai ingin menambah atau meningkatkan jumlah anggotanya. Dalam hal ini harus ada gerakan untuk bisa mencangkup semuanya, sehingga nantinya untuk merekrut atau pendaftar anggota pada partai politik akan banyak bergabung.

Strategi ofensif bertujuan untuk meningkatkan jumlah keanggotaannya, yang termasuk dalam strategi ofensif yang digunakan Partai Gelora Kabupaten Sampang adalah mencari anggota baru, pada dasarnya strategi ofensif merupakan alat untuk menambah jumlah keanggotaan di partai-partai politik.

Partai Gelora juga menggunakan Strategi ofensif selalu dibutuhkan apabila partai ingin meningkatkan jumlah pemilihnya atau apabila pihak eksekutif ingin mengimplementasikan sebuah proyek. Pada dasarnya, semua strategi ofensif yang diterapkan pada saat kampanye pemilu harus menampilkan perbedaan yang jelas dan menarik antara suatu kekuatan politik dengan partai pesaing yang ingin diambil alih

pemilihnya. Seperti yang diungkapkan Abd Muhlis Partai Gelora

Sampang:

“Sedangkan Partai Gelora kabupaten Sampang ini, sebagian menggunakan strategi ofensif untuk meningkatnya anggota. Sejak terbentuknya tahun 2019, Partai Gelora masuk pada pemilih dengan tipologi pedesaan. Partai Gelora mencoba bertransformasi menjadi partai religi-kerakyatan yang sering turun ke masyarakat. Partai Gelora mulai sedikit menyingkirkan label PKS yang melekat, dan berharap menjadi partai semua golongan.”⁷⁰

Partai Gelora menerapkan strategi terjun langsung ke masyarakat langsung. Para pengurus dan anggota dan kader partai Gelora didorong untuk berkomunikasi secara langsung, mendengarkan keluhan, menyampaikan program, dan melaksanakan program sebagai titik tekan strateginya. Partai Gelora menganggap hubungan kedekatan dengan masyarakat dibangun guna menjaga konstituen agar mengenal partai Gelora, Ini merupakan strategi alternatif yang dilakukan oleh Partai Gelora karena tidak adanya tokoh sentral (*central figure*) yang kuat.

Partai Gelora melakukan Kegiatan Langsung ke Lapangan, selain kegiatan Kunjungan, Partai Gelora Kabupaten Sampang juga turun langsung kelapangan untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terkena bencana alam seperti banjir yang sering terjadi di Kabupaten Sampang. Aktivitas yang dilakukan berupa pembagian makanan siap saji hingga penyaluran bantuan logistik. salah satu bentuk komunikasi politik yang dapat dilakukan oleh partai adalah

⁷⁰ Wawancara dengan abd muhlis di sekretariat partai Gelora Sampang, 5 januari 2023

agitasi. Agitasi berarti bergerak atau menggerakkan Kader Partai Gelora Kabupaten Sampang terus bergerak dalam rangka membantu masyarakat yang terkena bencana. Pada saat terjun kelapangan, atribut juga diikutkan sebagai simbol pelayan masyarakat sekaligus sosialisasi akan keberadaan sebuah partai yang memiliki rasa empati yang besar datang membantu walaupun bukan musim Pemilu.

Dalam memilih segmentasi pemilih pun, Partai Gelora tidak lagi menjadikan identitas agama sebagai fokus utama strateginya. Partai Gelora merasa harus melakukan penetrasi ke wilayah pedesaan, tapi dengan tanpa mengesampingkan strategi defensif guna mempertahankan basis massanya di wilayah perkotaan. Seperti yang diungkapkan Abd Muhlis ketua DPD Partai Gelora Sampang:

“Untuk konteks politik branding, strategi yang dilakukan Partai Gelora pada Pemilu tahun 2024 hampir sama dengan Partai yang lain, yakni dengan melibatkan teman-teman pengurus atau tokoh setempat. Namun strategi ini dilengkapi oleh Partai Gelora dengan pelaksanaan program sosial, seperti bansos dan pendekatan door to door dari para pengurus”.⁷¹

Temuan dalam penelitian ini bahwa rekrutmen terhadap anggota yang dilakukan Partai Gelora Kabupaten Sampang yaitu dilakukan dengan terbuka, yaitu sistem rekrutmen politik yang digunakan dalam penerimaan anggota partai. Penerimaan anggota ini tidak melihat status, kedudukan, dan kekayaan seseorang. Penerimaan anggota baru lolos tanpa tes dan tidak ada syarat khusus yang diberikan serta langsung diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan menjadi anggota

⁷¹ Wawancara dengan Abd Muhlis di sekretariat Partai Gelora Sampang, 5 Januari 2023

Partai Gelora. Seperti yang diungkapkan Junaidi Sekretaris DPD

Partai Gelora Sampang:

"Untuk rekrutmen anggota kita menggunakan sistem online atau mendaftar lewat situs resmi partai untuk pendaftaran dan juga menggunakan secara offline dengan door to door , terakhir yang kita gunakan masyarakat bisa langsung datang ke kantor untuk mendaftar dan cara yang terakhir setiap pengurus berkewajiban untuk mencari anggota di setiap wilayahnya masing-masing. Inilah tatacara yang kita lakukan untuk rekrutmen terhadap anggota."⁷²

Pernyataan tersebut sudah jelas Partai Gelora Kabupaten sampang dalam merekrut anggota tidak mengutamakan pengalaman seseorang. Rekrutmen yang dilakukan DPD Partai Gelora Kabupaten Sampang lebih mengarah untuk lolos verifikasi KPU. Dalam pernyataan tersebut juga dijelaskan beberapa cara dalam melakukan rekrutmen anggota yang dilakukan oleh Partai Gelora. Pertama, pendaftaran secara online. Masyarakat mendaftar untuk menjadi anggota langsung di situs resmi partai dengan mengisi formulir yang disediakan oleh pengurus, mengisi nama, mengisi Nomer Induk Kependudukan (NIK), dan keterangan lain, jika sudah diisi pendaftar akan segera dihubungi oleh pengurus partai untuk verifikasi. Kedua, pengurus Partai Gelora Kabupaten Sampang mendatangi langsung ke rumah-rumah masyarakat melalui DPD atau DPC hingga PAC wilayah masing-masing. Pendaftar yang ingin bergabung dengan Partai Gelora Kabupaten Sampang cukup memberikan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nanti akan dibuatkan kartu tanda anggota yang akan didistribusikan ke wilayah masing-masing pendaftar. Ketiga,

⁷² Wawancara dengan junaidi di sekretariat partai Gelora Sampang, 7 januari 2023

masyarakat secara langsung datang ke kantor DPD Partai Gelora Kabupaten Sampang untuk melakukan pendaftaran dan mengisi formulir yang telah disediakan oleh pengurus lalu memberikan fotocopy KTP untuk dibuatkan kartu tanda anggota (KTA).

a) Strategi Gerilya sunyi (serangan darat)

Gerilya sunyi dipilih oleh Partai Gelora Kabupaten Sampang sebagai strategi pemasaran politik atas instruksi dari Ketua DPD Partai Gelora agar Partai Gelora dapat membuktikan kepada masyarakat bahwa berpolitik harus apa adanya, tidak suka mencampuri perkataan, dapat dilakukan dengan finansial yang terbatas, dan tanpa adanya tokoh tertentu. Selain itu, alasan lain dalam penggunaan strategi gerilya sunyi ini adalah untuk membangun dan menjalin kedekatan secara langsung dengan masyarakat melalui komunikasi dan tatap muka. Gerilya sunyi diyakini merupakan cara yang efektif, efisien dan terukur, serta dapat membangun hubungan jangka panjang yang baik dengan masyarakat. Pemahaman para pengurus mengenai pemasaran politik melalui gerilya sunyi serta kondisi politik di Indonesia ini membuat mereka menjadikan hal tersebut sebagai landasan untuk menjalankan strategi ini dalam memasarkan Partai Gelora.

Pemilihan gerilya sunyi sebagai strategi untuk pemasaran politik juga erat kaitannya dengan pengetahuan dan pemahaman dari pengurus atas realitas yang terjadi di dunia pepolitan

Indonesia. Pengetahuan ini bersifat subjektif dan masih dipengaruhi oleh pemikiran individual mereka serta pengetahuan ini terbentuk berdasarkan pengalaman subjektif individu terhadap berbagai macam informasi yang diterima. Interaksi dan pertemuan dengan orang lain menyebabkan pertukaran informasi yang kemudian dapat memengaruhi pengetahuan. Konstruktivisme sosial menjelaskan bahwa pengetahuan merupakan hasil dari interaksi simbolis dengan kelompok-kelompok sosial. Dengan kata lain, kenyataan terbentuk secara sosial, sebuah hasil kehidupan kultural dalam kelompok.⁷³ Berger dan Luckmann menyatakan dunia kehidupan sehari-hari menampilkan diri sebagai kenyataan yang ditafsirkan oleh manusia.⁷⁴ Pada kenyataannya, realitas sosial tidak berdiri sendiri tanpa kehadiran individu baik di dalam maupun di luar realitas tersebut.⁷⁵ Salah satu kekurangan strategi gerilya sunyi yang dijalankan Partai Gelora adalah tidak adanya tokoh-tokoh nasional ataupun orang yang terkenal. Hal ini menyebabkan Partai Gelora menjadi jarang diketahui dan didengar namanya oleh masyarakat. Bapak abd muhlis sebagai ketua DPD partai Gelora Kabupaten Sampang menyebutkan bahwa tokoh sentral memiliki peranan yang penting. Tokoh sentral dapat menjadi penarik

⁷³ Little John, Stephen W & Karen A.Foss, *Teori Komunikasi, edisi 9*, (Jakarta: Salemba Humanika 2009), 25.

⁷⁴ Berger, Peter dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Sebuah Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, (Jakarta: LP3ES, 2013),28.

⁷⁵ Bungin, Burhan, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, (Jakarta: Kencana, 2007), 6.

dukungan dan memberikan pengaruh yang kuat dalam jangka waktu yang lama.

Sebagai partai yang baru, gerilya sunyi dilakukan untuk mengenalkan Partai Gelora kepada masyarakat serta untuk menjaring anggota baru. Pencarian anggota merupakan tujuan yang paling utama karena salah satu syarat lolosnya partai peserta Pemilu 2024. Syarat untuk memenuhi sebagai peserta pemilu adalah partai politik harus memiliki 75% kepengurusan Kab/Kota di provinsi, dan memiliki Kepengurusan 50% Kecamatan di Kab/kota, menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan Perempuan didalam kepengurusan, memiliki anggota paling sedikit 1.000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk.

Strategi pemasaran politik melalui gerilya sunyi dilakukan oleh pengurus Partai Gelora Kabupaten Sampang. Ketua dan jajaran pengurus Partai Gelora memiliki peran untuk menginstruksikan para pimpinan kecamatan dalam melakukan gerilya sunyi, kemudian melakukan pengawasan dan pengarahan terhadap kader yang turun ke lapangan, dan memastikan kader tersebut telah memiliki materi yang menarik dan mengangkat isu atau permasalahan seputar daerah terkait. DPD partai Gelora Kabupaten Sampang juga berperan untuk menampung aspirasi masyarakat yang telah disampaikan kepada kader yang turun ke lapangan, kemudian aspirasi itu diolah dan diatasi jika ada isu yang

berdampak nasional. Pemantauan kinerja para tim sukses dilakukan melalui Komunikasi internal Partai Gelora dan dievaluasi secara berkala.

Partai Gelora, dalam melakukan pemasaran politik, menyasar seluruh kalangan dengan target utama anak muda dan masyarakat kalangan menengah kebawah. Gerakan ini dilakukan dengan langsung mendekati masyarakat, terutama orang terdekat terlebih dahulu. Partai Gelora mengkalim bahwa mereka sering merekrut orang-orang dari kalangan bawah non politisi untuk membuktikan bahwa mereka adalah partai yang pro rakyat. Seperti yang diungkapkan Junaidi Sekretaris DPD Partai Gelora Sampang:

“iya mas, kami dari pengurus berupaya untuk melakukan pendekatan secara langsung dari kalangan kelas bawah yang belum ber partai dan juga mereka yang punya gagasan yg mereka punya. namun untuk melakukan itu kami mas, sudah mengarahkan kepada setiap pengurus untuk menggunakan strategi gerilya sunyi maksudnya dalam strategi ini adalah mode senyap artinya tidak ramai seperti mengadakan seminar namun yang kami lakukan adalah mode senyap atau (*rem te errem*) bahasa ini yang kami kenal. Jadi prosesnya kam datang pada masyarakat dan bertemu langsung di rumah atau di langgar secara tertutup biasanya setiap rumah ada 1-2 orang yang di temui kami berdiskusi dan komunikasi secara langsung dengan santai.”⁷⁶

Partai Gelora mencari orang-orang yang dianggap sepeham dan bukan merupakan tokoh politik dengan tujuan untuk menokohkan orang biasa menjadi tokoh di daerahnya. Perekrutan pengurus partai yang berasal dari orang-orang biasa non tokoh politik dianggap sebagai salah satu strategi yang efektif. Orang

⁷⁶ Wawancara dengan junaidi di sekretariat partai Gelora Sampang, 7 januari 2023

biasa yang menjadi tokoh di daerahnya mendorong orang tersebut untuk bekerja dengan sepenuh hati, sekuat tenaga, dan berusaha menjadikan Partai Gelora sebagai partai terbaik di wilayahnya. Partai Gelora juga melakukan pendekatan ke komunitas seperti halnya mahasiswa, pemuda desa, alumni pondok serta organisasi kemasyarakatan. Seperti yang diungkapkan anggota Partai Gelora Sampang:

“Sedikit bercerita ya kak, saya waktu di rekrutmen tidak sengaja di ajak oleh saudara untuk ikut bagian dari partai Gelora dan itupun saya waktu itu ada di rumah. Karena saya sedikit pun tidak faham partai jadi ya ikut aja dan saat itu langsung di daftarin secara langsung oleh pengurus”⁷⁷

Partai Gelora dalam menjalankan strategi gerilya sunyi melakukan segmentasi demografis dan geografis. Dari segmentasi ini, pengurus partai menentukan target utama yang dituju, yaitu masyarakat dengan kelas sosial bawah. Hal ini dilakukan karena Partai Gelora ingin memberi gambaran bahwa mereka adalah partai rakyat yang peduli dan berasal dari kalangan bawah. Menyasar kalangan atas tentu akan menjadi lebih sulit bagi Partai Gelora, karena menurut Imawan (dalam Nursal, 2004 : 120)⁷⁸. tingkat kesejahteraan sosial memengaruhi perilaku politik pemilih semakin makmur tingkat ekonomi seseorang, maka mereka akan cenderung kritis dalam menentukan pilihan dan mementingkan kualitas isu

⁷⁷ Wawancara dengan Hisbul di sekretariat Partai Gelora Kabupaten Sampang, 10 Januari 2023

⁷⁸ Adman Nursal, *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004) hal. 120.

dan kualitas kandidat yang diajukan oleh partai. Selain berdasarkan kelas sosial, Partai Gelora juga memilih segmentasi anak muda karena sebagian besar anggota Partai Gelora merupakan milenial dan roda partai pun digerakkan oleh milenial. Anak muda dianggap sebagai generasi yang ingin perubahan Segmentasi geografis turut digunakan oleh Partai Gelora dalam berkomunikasi dan menyampaikan isu berbeda-beda terhadap masyarakat. Kombinasi antara segmen kelas menengah-bawah, anak muda, dan geografis bisa dikatakan cukup efektif, karena dari gaya komunikasi dan isu yang diangkat disesuaikan dengan geografis masyarakat akan lebih mudah diterima, serta anak muda sebagai generasi penerus dan orang yang berasal dari kalangan bawahlah yang biasanya menginginkan perubahan. Dengan segmentasi tersebut, Partai Gelora memilih *positioning* sebagai partai anak muda dan partai rakyat.

b) Strategi Media Sosial (Serangan udara)

Dizaman yang semakin maju, semakin lama cara berkomunikasi dan penyampaian informasi semakin berkembang. Perubahan tersebut yang terjadi saat ini salah satunya karena kemunculan media sosia. Dari hari ke hari penggunaan media sosial kian pesat dengan semakin mudahnya akses internet di rumah-rumah, juga dengan berkembangnya teknologi. Para pengguna

internet dapat mengakses internet 24 jam dari personal *handpone* masing-masing.

Dengan adanya strategi media sosial Partai Gelora Kabupaten Sampang saat ini menggunakan proses rekrutmen anggota Partai Gelora secara online untuk mempermudah proses pendaftaran sebagai anggota partai politik, dan adapun situs yang telah digunakan beberapa situs diantaranya;

1) Website

Dalam dunia teknologi website dapat diartikan sekumpulan halaman yang terdiri atas beberapa laman yang berisi informasi dalam bentuk data digital yang disediakan melalui alur koneksi internet.

Website merupakan suatu kumpulan komponen yang terdiri dari teks, gambar, suara animasi sehingga lebih merupakan media informasi yang menarik untuk dikunjungi.

Adanya website ini diperlukan jaringan bias mempermudah serta mempercepat penyampaian informasi secara luas dan dapat dengan mudah dan cepat oleh siapapun.

Adapun website merupakan salah satu alat yang digunakan oleh Partai Gelora Kabupaten Sampang untuk strategi rekrutmen anggota dengan cara melalui website,

agar lebih mudah dan cepat mendapatkan informasi secara leluasa.

Gambar 4.4
Situs website Partai Gelora dalam rekrutmen anggota partai politik.

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "Pendaftaran Anggota Partai G... gabung.partaigelora.id". The page features a blue header with the text "HARI INI RIBET GABUNG PARTAI?" and a QR code. Below the header is a registration form with the following fields:

- Nama Lengkap (*)
- Alamat Lengkap (*)
- Email (*)
- Tempat Lahir (*)
- Golongan Bangsa (*)
- Melayak (*)
- Kelengkapan (*)
- Kelamin (*)
- Kebudayaan / Desa (*)
- Alamat Rumah (*)
- Alamat KTP (*)
- RT (*)
- Rukun (*)
- Agama (*)
- Pekerjaan (*)
- Hasil Foto Terbaru (*)
- Hasil Foto (*)
- Hasil Foto (*)
- No KTP (Pegang 10 angka) (*)
- Telepon
- Tempat Lahir (Nominal 12 angka) (*)
- Jenis Kelamin (*)
- Status Pernikahan
- Pendidikan
- Hasil Foto (*)

At the bottom of the form, there is a checkbox for "Saya pernah" and a "Daftar" button.

2) Facebook

Facebook merupakan situs yang layanan utamanya adalah layanan jejaring sosial. Media facebook ini menunjukkan jalan dimana mereka berhubung karena kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang dikenal sehari-hari sampai dengan keluarga. Tujuan adanya facebook adalah membuat dunia lebih terbuka dan terhubung, sejak itulah media facebook telah memiliki kekuatan yang mempengaruhi semua kalangan masyarakat.

Pada facebook ini banyak sekali keunggulan seperti tampilan lebih simpel, lengkap dan mudah serta info-info facebook lebih lengkap seperti organisasi, partai politik dan lain-lain. Namun, Facebook bisa juga di gunakan sebagai strategi untuk merekut anggota dalam sebuah partai politik. Melalui facebook ini untuk mempermudah untuk memberikan informasi mengenai seputar alur pendaftaran sampai tahap penyeleksian.

Jadi Partai Gelora Kabupaten Sampang menggunakan alat media facebook untuk memberikan seputar informasi, sehingga dengan facebook Partai Gelora Kabupaten Sampang lebih efektif untuk memberikan suatu informasi dalam merekrut anggota Partai Gelora Kabupaten Sampang.

Gambar 4.5
Media sosia facebook Partai Gelora Kabupaten Sampang dalam rekrutmen anggota



3) Instagram

Instragram adalah sosial media dari sebuah aplikasi yang merupakan dari media digital yang mempunyai fungsi hampir sama dengan twitter. Instagram juga dapat memberikan informasi secara online dan cepat.

Instagram merupakan jejaring sosial sebagai alat komunikasi untuk mempermudah akses segala informasi. Pada instragram ini banyak sekali keunggulan seperti tampilan lebih simpel, lengkap dan mudah serta info-info lebih lengkap seperti mengakses informasi organisasi, partai politik dan lain-lain.

Namun, Instagram juga di gunakan sebagai strategi untuk merekut anggota dalam sebuah partai politik. Melalui Instagram ini untuk mempermudah untuk memberikan informasi mengenai seputar alur pendaftaran sampai tahap penyeleksian.

Jadi Partai Gelora Kabupaten Sampang menggunakan alat media instagram untuk memberikan seputar informasi, sehingga dengan instagram Partai Gelora Kabupaten Sampang lebih efektif untuk memberikan suatu informasi dalam merekrut anggota Partai Gelora Kabupaten Sampang.

Gambar 4.6
Media Sosia Instagram Partai Gelora Kabupaten Sampang dalam
rekrutmen anggota



Strategi rekrutmen melalui media sosial memang menjadi satu fenomena unik akhir-akhir ini. Hal ini terjadi tidak lain karena didapati adanya peningkatan pada beberapa situs media sosial terutama facebook, instagram. Jumlah pengguna situs di media sosial tersebut didapati terus bertambah dari waktu ke waktu. Penggunaan strategi rekrutmen via media sosial memang memberi kemudahan. Media sosial merupakan bentuk komunikasi dan rekreasi yang menjangkau masyarakat secara luas sehingga pesan informasi yang sama dapat diterima serentak dan sesaat. Media massa terdiri dari media cetak dan media elektronik. Media massa diidentifikasi sebagai media sosialisasi yang berpengaruh pula terhadap proses sosialisasi dan strategi. Berbagai situs media sosial khususnya media elektronik menjadi wadah sosialisasi yang empuk dengan massa yang sudah pasti luasnya. Dari media inilah, setiap

organisasi “mempromosikan” setiap kegiatan yang mereka lakukan termasuk dalam perekrutan anggota baru.

Masyarakat yang tertarik dengan Partai Gelora ini bisa melihat langsung bahwa ada registrasi untuk anggota Partai Gelora baik melalui akun facebook atau website. Namun didalam akun tersebut tidak terdapat formulir yang bisa diisi oleh anggota baru, melainkan hanya pemberitahuan kepada masyarakat bahwa Partai Gelora Kabupaten Sampang membuka rekrutmen anggota baru Partai Gelora. Sedangkan masyarakat sendiri berinisiatif untuk langsung mendaftarkan diri di kantor Dewan Pengurus Daerah Partai Gelora Kabupaten Sampang.

Perekrutan memang dilakukan melalui media sosial. Walaupun yang memegang kendali dalam sosialisasi tersebut adalah dari pihak DPP Pusat Partai Gelora dan berlaku untuk semua daerah. Data yang dikumpulkan oleh peneliti juga menunjukkan bahwa media sosial (facebook dan Intagram) yang digunakan untuk rekrutmen ialah akun yang menggunakan nama DPD Gelora Kabupaten Sampang yang dipegang langsung oleh pengurus partai yang berada di Daerah. Sedangkan untuk daerah Kecamatan Kabupaten Sampang, DPC Partai Gelora Kabupaten Sampang belum mempunyai akun facebook dan Instagram resmi.

Sementara itu, informasi mengenai perekrutan yang dilakukan di media sosial sedikit banyak diketahui oleh anggota partai Gelora secara langsung. Seperti yang diungkapkan Muslihah Partai Gelora Sampang:

“Iya mas, awal mula saya tidak begitu tau kalau ada rekrutmen lewat facebook dan juga melalui Instagram. Saya juga baru

mengetahui jika ada rekrutmen melalui facebook untuk daftar sebagai anggota partai Gelora dan lagi mas, saya ikut daftar sebagai anggota partai Gelora mendaftar melalui online karena lebih mudah untuk mengaksesnya dan tidak ribet”⁷⁹

Hasil wawancara dengan Anggota diatas, ini membuktikan bahwa beberapa anggota belum mengetahui informasi perekrutan yang dilakukan Partai Gelora melalui sosial media. Informasi perekrutan yang disebarakan melalui sosial media juga kurang begitu gencar dilakukan. Hal ini dimungkinkan karena strategi perekrutan ini tidak ditangani langsung oleh beberapa pengurus DPC hingga PAC yang ada di daerah setempat.

b. Strategi Defensif (merawat)

Strategi defensif adalah suatu strategi yang dibuat dengan tujuan agar partai politik melakukan tindakan-tindakan merawat atau bertahan agar terlepas dari serangan.

Strategi defensif merupakan strategi untuk mempertahankan keanggotaanya, Partai politik yang menggunakan strategi ini cenderung untuk menutupi perbedaan yang ada dimasing-masing partai, sehingga perbedaan tersebut tidak dapat dikenali oleh Partai politik lain.

Strategi Defensif menyangkut strategi untuk mempertahankan basis konstituen (pemilih tradisionalnya) dan strategi untuk menutup penyerangan dari partai lain. Strategi defensif akan muncul ke permukaan, salah satunya apabila partai pemerintah atau sebuah koalisi pemerintahan yang terdiri atas beberapa partai ingin mempertahankan mayoritasnya apabila *potential constituent* (pemilih

⁷⁹ Wawancara dengan Muslihah di sekretariat Partai Gelora Kabupaten Sampang, 12 Januari 2023

potensial) ingin dipertahankan. Selain itu, strategi defensif juga dapat muncul apabila sebuah arena kontestasi atau basis konstituen tidak akan dipertahankan lebih lanjut atau ingin ditutup, dan penutupan basis konstituen diharapkan membawa keuntungan sebanyak mungkin.

“ kami sejak awal mangajak sebagai anggota partai tidak pernah menjajika apa-apa ke mereka mas, akan tetapi kami berusaha untuk terbaik untuk masyarakat apa yang menjadikan persoalan di setiap daerah dan tentu kami siap jika hal yg di butukan akan berupaya semaksimal mungkin mas..jadi jika ada anggota kami masih berkomitmen sejak awal yang saya sampaikan insallah akan mempertahankan mas demi kemaslahatan bersama”⁸⁰

Perencanaan strategi untuk perubahan dan proses politik merupakan suatu gambaran dari keadaan kekuasaan yang jelas tentang tujuan akhir yang akan dicapai dan pemusatan segala kekuatan untuk mencapai tujuan. Dari gambaran perencanaan tersebut terdapat perumusan sasaran kedepan, respon yang didapat dan penetapan strategi untuk mengimplementasikannya secara rasional.

Dalam masyarakat demokratis, pengambil-alihan kekuasaan dan peluang untuk merebut pengaruh dilakukan melalui pemilu yang demokratis dalam berbagai bentuk. Tujuannya adalah untuk memperoleh bagian suara yang cukup dalam pasar pemilu. Untuk demikian, diperlukan adanya kekuatan yang dapat berpengaruh secara langsung saat Pemilu.

⁸⁰ Wawancara dengan abd muhlis di sekretariat Partai Gelora Kabupaten Sampang, 5 Januari 2023

a) **Strategi Komunikasi Tatap Muka** (*face to face*)

Kegiatan tatap muka (*face to face*) pada masyarakat merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Partai Gelora Kabupaten Sampang dalam menyampaikan informasi mengenai Partai Gelora. Komunikasi tatap muka (*face to face*) merupakan bagian dari komunikasi antar pribadi yang umumnya berlangsung secara langsung. Salah satu cara yang dilakukan oleh pengurus DPD dan DPC Partai Gelora Kabupaten Sampang yaitu dengan mengadakan acara Ngobrol sambil Ngopi atau diskusi kecil dengan berbagai tema mengenai politik. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap bulan oleh pengurus partai Gelora. Tujuan acara Ngobrol sambil Ngopi adalah untuk membuka wawasan serta memberi pemahaman politik kepada para pemuda tentunya.

Abd Muhlis, selaku Ketua DPD Gelora Kabupaten Sampang mengatakan:

“kita turun langsung ke masyarakat yang dilakukan oleh pengurus Gelora Kabupaten Sampang tidak lain yaitu untuk bisa beradaptasi oleh pemuda di desa ataupun masyarakat yang memang betul betul mempunyai gagasan yang bisa kita sampaikan beberapa pengurus sehingga bisa membantu apa yang menjadi persoalan selama ini di setempat”⁸¹

Berdasarkan wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Partai Gelora Kabupaten Sampang melakukan terjun kemasyarakat langsung dengan suatu kegiatan yang nyata, namun

⁸¹ Wawancara dengan abd muhlis di sekretariat partai Gelora Sampang, 1april 2023

hal itu harus dibuktikan dengan suatu hasil dan tindakan yang nyata pula dari “ngopi” sambil diskusi tersebut.

Dalam hal ini Partai Gelora Kabupaten Sampang berusaha mewujudkan strategi komunikasi secara langsung (*face to face*) dengan cara memberikan pengetahuan politik dan pendidikan politik pada saat melakukan diskusi dengan masyarakat, calon anggota, maupun yang telah bergabung menjadi anggota Partai Gelora yaitu dengan cara memberikan seputar Politik dan Pengetahuan Politik sesuai dengan Isi Sosialisasi Politik yaitu pengetahuan politik sangat terkait dengan pemahaman akademis terhadap fenomena politik, artinya fenomena politik diberikan secara terstruktur dalam bentuk kurikulum pendidikan. Karena itu Partai Gelora Kabupaten Sampang sangat mengedepankan komunikasi tatap muka (*face to face*) hal ini di yakini sebagai bentuk komunikasi ini yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan Partai Gelora Kabupaten Sampang menjadi peserta pemilihan umum 2024.

“iya mas, jadi pengurus partai gelora waktu itu hanya bisa dengan cara terjun langsung, melakukan bantuan nyata kepada masyarakat sehingga ya mungkin cara inilah partai gelora bisa kesempatan dekat dengan masyarakat dengan membuat pelatihan-pelatihan seperti UMKM, dll.”⁸²

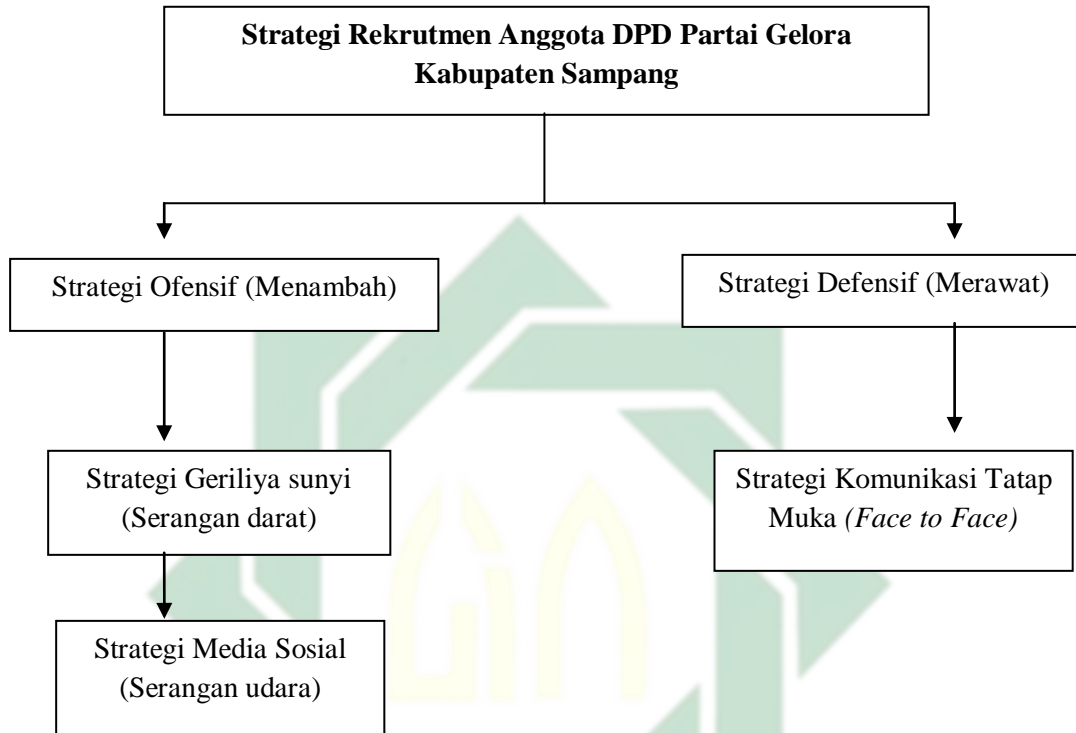
⁸² Wawancara dengan Badrul Munir di sekretariat Partai Gelora Kabupaten Sampang, 10 Januari 2023

Pernyataan di atas adalah strategi komunikasi yang di gunakan oleh Partai Gelora Kabupaten Sampang dengan partai lainnya pada umumnya sama akan tetapi dikemas dengan cara yang berbeda guna membangun proses interaksi sosial kepada masyarakat baik melalui kegiatan formal maupun non informal.

Komunikasi tatap muka (*face to face*) merupakan bagian dari komunikasi antar pribadi yang umumnya berlangsung secara langsung. Melalui strategi komunikasi tatap muka (*face to face*) Partai Gelora Kabupaten Sampang dapat melakukan pendekatan secara langsung antara pengurus Partai Gelora dengan masyarakat ataupun calon anggota. dengan tujuan untuk memenuhi syarat partai politik menjadi peserta pemilihan umum berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang Nomor Tahun 2017 Pasal 173 yaitu memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik.

Gambar 4.7

Strategi Rekrutmen Anggota DPD Partai Gelora Kabupaten Sampang



3. Strategi Pengadaan Sekretariat DPD Partai Gelora Kabupaten Sampang

Penelitian penulis langsung melakukan wawancara terhadap subjek yang terkait dengan fokus penelitian. Wawancara tersebut bertujuan untuk menggali data dan fakta secara rinci strategi pengadaan Sekretariat DPD Partai Gelora Kabupaten Sampang, mulai dari kriteria pemilihan Sekretariat, kendala dalam pemilihan Sekretariat dan strategi dalam pemilihan Sekretariat. Adapun mengenai hasil penelitian ini penulis menguraikan sebagai berikut:

a. Kriteria pemilihan Sekretariat DPD Partai Gelora Kabupaten Sampang

Hasil wawancara terkait dengan Kriteria dalam pemilihan Sekretariat DPD Partai Gelora Kabupaten Sampang antara lain:

“Dalam menjalankan Aktivitas memang kriteria utama yang kita inginkan adalah mempunyai sekretariat, kriteria yang saya memilih Sekretariat disini, karena untuk memenuhi persyaratan sebagai berdirinya partai politik baru bisa lolos verifikasi, wilayah ini dekat dengan Bawaslu Kabupaten Sampang pas di depan kantor kami, dan juga tidak jauh dengan kantor partai Hanura sekitar berapa meter dari kantor kami, selain itu dekat dengan jalan raya”⁸³

Hasil wawancara dengan Bapak Abd Muhlis ketua DPD Partai Gelora Kabupaten Sampang mengenai kriteria pemilihan Sekretariat dia memilih lokasi di daerah tersebut karena tempatnya sangat strategis banyak berdirinya perkantoran dan mudah di jangkau, lokasinya juga dipinggir jalan Raya. Bagi Bapak Muhlis wilayah tersebut sangat strategis dijadikan tempat sekretariat DPD Partai Gelora Kabupaten Sampang, terutama untuk roda aktivitas seperti untuk para calon yang ingin bergabung dengan Partai kami, seperti berkunjung setidaknya kami sudah punya tempat untuk beraktivitas untuk berlangsung jalannya perpolitikan pada umumnya.

Dapat disimpulkan bahwa kriteria pemilihan lokasi oleh pengurus Partai Gelora Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

- 1) kedekatan dengan perkantoran.
- 2) kedekatan dengan jalan Raya atau keramaian

⁸³Wawancara dengan abd muhlis di sekretariat partai Gelora Sampang, 5 januari 2023

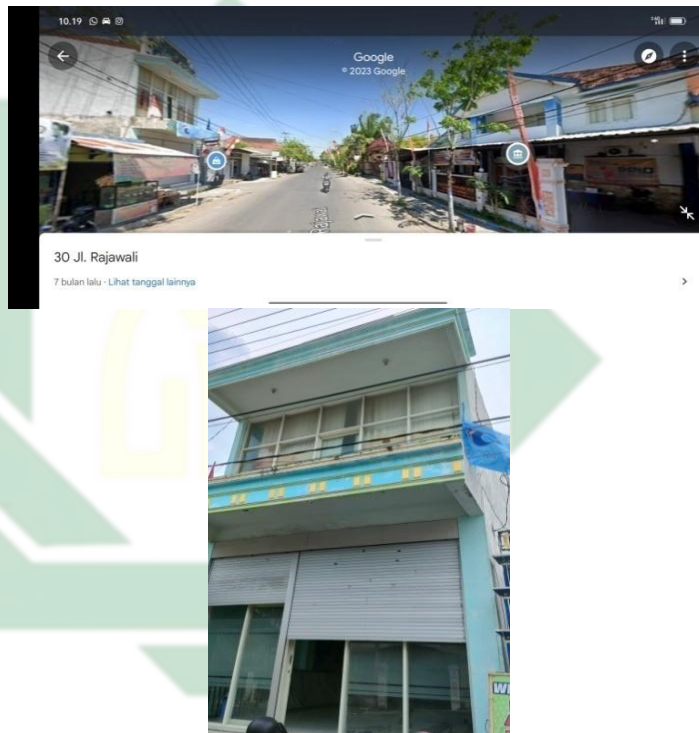
Kriteria pemilihan lokasi sekretariat DPD Partai Gelora Kabupaten Sampang. Berdasarkan analisis hasil wawancara dengan subjek yang diteliti, Adapun subjek yang mempunyai kriteria dalam pemilihan lokasi sekretariat DPD Partai Gelora Kabupaten Sampang yaitu:

- a. Kedekatan dengan perkantoran yang mengatakan bahwa kriteria dalam pemilihan lokasi sekretariat DPD Partai Gelora Kabupaten Sampang adalah kriteria kedekatan dengan perkantoran seperti Bawaslu Kabupaten Sampang dan sekretariat partai Hanura dan partai Golkar.
- b. Kedekatan dengan jalan atau keramaian yang mengatakan bahwa kriteria yang berpengaruh dalam pemilihan lokasi sekretariat DPD Partai Gelora Kabupaten Sampang disebabkan oleh kriteria kedekatan dengan jalan atau keramaian.
- c. Kepadatan penduduk yang mengatakan bahwa kriteria dalam pemilihan lokasi Sekretariat DPD Partai Gelora Kabupaten Sampang disebabkan oleh kepadatan penduduk.
- d. Infrastruktur yang mengatakan bahwa kriteria dalam pemilihan lokasi sekretariat DPD Partai Gelora Kabupaten Sampang disebabkan oleh faktor Infrastruktur.
- e. Kedekatan dengan tempat tinggal yang mengatakan kriteria dalam pemilihan lokasi sekretariat DPD Partai Gelora Kabupaten Sampang disebabkan oleh faktor kedekatan dengan tempat tinggal.

f. Mudah dijangkau yang mengatakan kriteria dalam pemilihan lokasi sekretariat DPD Partai Gelora Kabupaten Sampang disebabkan oleh kriteria mudah dijangkau.

Gambar 4.8

Sekretariat Partai Gelora Kabupaten Sampang



Berdasarkan hasil pemaparan di atas yang diteliti bahwa kriteria dalam pemilihan lokasi sekretariat DPD Partai Gelora Kabupaten Sampang yakni kriteria kedekatan dengan perkantoran. Sedangkan penyebab faktor terkecil yang kriteria dalam pemilihan lokasi sekretariat DPD Partai Gelora Kabupaten Sampang yaitu faktor mudah dijangkau, faktor infrastruktur, faktor kepadatan penduduk, dan faktor kedekatan dengan jalan raya.

b. Sarana dan Prasarana Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Gelora Kabupaten Sampang

Sarana dan prasarana sebagai salah satu penunjang proses kelancaran dalam kegiatan partai dan penunjang kerja partai. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Junaidi selaku sekretaris DPD Partai Gelora Kabupaten Sampang, 7 Januari 2023 berikut ini:

Sarana dan prasarana yang tersedia pada Sekretariat Dewan Pengurus Daerah Partai Gelora Kabupaten Sampang sebagai berikut:

- 1) Bangunan Dewan Pengurus Daerah Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) terdiri dari satu gedung DPD, yang didalamnya terdapat ruangan-ruangan.
- 2) Ruang dan perlengkapan yang ada, terdiri dari: ruang kantor ketua Partai Gelora, ruang tamu, ruang pertemuan, tempat sholat, ruang komputer, dan areal paker, sedangkan perlengkapan yang ada yaitu: komputer 3 buah, LCD, sound system, print, kipas angin, AC, dan meja tenis.
- 3) Kendaraan Dewan Pengurus Daerah Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) yang terbagi menjadi 3 kendaraan yaitu: mobil untuk inventaris partai, motor untuk ketua umum, dan motor untuk pengurus lainnya”.

c. Strategi-strategi dalam pemilihan lokasi sekretariat DPD Partai

Gelora Kabupaten Sampang

Adapun hasil wawancara terkait dengan strategi-strategi dalam memilih Sekretariat DPD Partai Gelora ini antara lain:

“dari awalnya saya memilih lokasi, saya sudah benar-benar memikirkan jauh-jauh hari. Walaupun sedikit ragu dalam memilih lokasi ini sebagai tempat sekretariat terkait dengan keuangan yang sedikit. Namun melihat kondisi sekitar lokasi yang dekat dengan perkantoran dan padatnya penduduk disekitar lokasi menjadi pertimbangan dan strategi saya dalam memilih lokasi sekretariat yang akan saya jalani dan meyakinkan saya bahwa lokasi ini tepat untuk dijadikan sekretariat DPD Partai Gelora Kabupaten Sampang”⁸⁴

Hasil wawancara dengan Bapak Sahrul Mukkarom Bendahara DPD Partai Gelora Kabupaten sampang mengenai strategi dalam pemilihan lokasi sekretariat, Sahrul Mukarrom menggunakan Strategi dengan memperhatikan tingkat kepadatan penduduk dan kedekatan dengan area perkantoran. Sehingga dengan pertimbangan tersebut meyakinkan dia bahwa lokasi ini strategis dan mudah terjangkau untuk tempat Sekretariat DPD Partai Gelora Kabupaten Sampang .

Dapat disimpulkan bahwa Strategi dalam memilih lokasi sekretariat DPD Partai Gelora Kabupaten Sampang, Bapak Sahrul Mukarrom di jalan Rajawali No. 13 Sampang adalah sebagai berikut:

- 1) Strategi pemilihan lokasi mempertimbangkan tingkat kepadatan penduduk.

⁸⁴ Wawancara dengan sahrul mukarrom di sekretariat partai Gelora Sampang, 6 januari 2023

- 2) Strategi pemilihan lokasi dengan memperhatikan kedekatan lokasi dengan area perkantoran, dan jalan raya.

Strategi-Strategi dalam pemilihan lokasi sekretariat DPD Partai Gelora Kabupaten Sampang Berdasarkan analisis hasil wawancara menemukan strategi dalam pemilihan lokasi sekretariat DPD Partai Gelora Kabupaten Sampang yaitu:

- a. Strategi bahwa pemilihan lokasi dengan mempertimbangkan tingkat kepadatan penduduk terlihat strategi yang digunakan dalam pemilihan lokasi sekretariat DPD Partai Gelora Kabupaten Sampang adalah Strategi pemilihan lokasi mempertimbangkan tingkat kepadatan penduduk.
- b. Strategi pemilihan lokasi dengan mempertimbangkan kedekatan lokasi dengan area perkantoran terlihat bahwa strategi yang mereka gunakan ketika pemilihan lokasi sekretariat DPD Partai Gelora Kabupaten Sampang ini yaitu oleh Strategi pemilihan lokasi mempertimbangkan kedekatan lokasi dengan area perkantoran.
- c. Strategi pemilihan lokasi dengan mempertimbangkan kedekatan dengan jalan raya terlihat bahwa Strategi yang digunakan ketika pemilihan lokasi sekretariat DPD Partai Gelora Kabupaten Sampang yaitu Strategi mempertimbangkan kedekatan dengan jalan raya.

d. Strategi pemilihan lokasi dengan memperhatikan tingkat keamanan Lokasi yang mendukung. Terlihat bahwa Strategi yang digunakan ketika pemilihan lokasi sekretariat DPD Partai Gelora Kabupaten Sampang yaitu Strategi pemilihan lokasi memperhatikan tingkat keamanan Lokasi yang mendukung.

e. Strategi pemilihan lokasi dengan infrastruktur

Terlihat bahwa strategi yang digunakan subjek ketika pemilihan lokasi sekretariat DPD Partai Gelora Kabupaten Sampang yaitu Strategi pemilihan lokasi infrastruktur.

f. Strategi pemilihan lokasi dengan mempertimbangkan sarana dan prasarana.

Terlihat bahwa strategi yang digunakan subjek ketika pemilihan lokasi sekretariat DPD Partai Gelora Kabupaten Sampang yaitu Strategi pemilihan lokasi dengan mempertimbangkan sarana dan prasarana.

Berdasarkan hasil pemaparan di atas bahwa strategi pemilihan lokasi sekretariat DPD Partai Gelora Kabupaten Sampang yaitu Strategi pemilihan lokasi dengan mempertimbangkan tingkat kepadatan penduduk, infrastruktur, kedekatan lokasi dengan perkantoran dan kedekatan area jalan raya.

Sedangkan Strategi terkecil yang digunakan ketika pemilihan lokasi sekretariat DPD Partai Gelora Kabupaten Sampang yaitu Strategi pemilihan lokasi dengan memperhatikan tingkat keamanan lokasi yang

mendukung, dan Strategi pemilihan lokasi dengan mempertimbangkan sarana dan prasarana.

d. Sumber Dana

Sumber dana yang digunakan saat pengadaan sekretariat Partai Gelora Kabupaten Sampang dengan berbasis sumbangan seikhlasnya berbagai pengurus DPD dan DPC untuk tempat Sekretariat administrasi sebagai partai politik dan adapun tempat sekretariat tersebut dengan sistem sewa seharga 50 juta dengan jangka panjang selama 2 tahun. Seperti yang diungkapkan Sahrul Mukarrom Bendahara DPD Partai Gelora Sampang:

“sebenarnya kami mas, memang kewalahan dana karena selama ini DPW tidak memberikan dana untuk sewa lahan tempat secara terpaksa kami seluruh pengurus melakukan sumbangan untuk sewa tempat sebagai sekretariat agar bisa lolos verifikasi peserta pemilu 2024 mas”⁸⁵

4. Strategi Komunikasi Politik dengan Penyelenggara Pemilu

Dalam melakukan komunikasi politik tiap partai memiliki beberapa ciri khas juga metode sebagai petunjuk ideologi dan platform partai terkecuali, Partai Gelora Kabupaten Sampang memiliki kriteria khusus dalam melakukan strategi komunikasi politik dengan penyelenggara pemilu :

Hubungan harmonis saat melakukan verifikasi faktual pengurus DPD Partai Gelora Kabupaten Sampang telah melakukan komunikasi dengan baik dengan penyelenggara pemilu untuk mudah mendapatkan informasi seputar jadwal yang sudah di tentukan oleh KPUD Sampang

⁸⁵ Wawancara dengan sahrul mukarrom di sekretariat partai Gelora Sampang, 6 januari 2023

waupun tidak diberikan jadwal sepenuhnya akan tetapi partai Gelora tersebut tetap berkomunikasi sangat baik agar informasi yang didapatkan mudah ketika verifikasi faktual di lapangan untuk mempermudah penyelenggara pemilu.

Adapun strategi komunikasi partai Gelora saat verifikasi faktual dilapangan dengan penyelenggara pemilu partai Gelora Kabupaten Sampang telah membangun strategi sebagai berikut:

Pertama, Liaison officer penghubung partai politik mempunyai peran yang sangat penting dalam penyerahan dokumen saat verifikasi faktual agar mudah komunikasi dengan penyelenggara pemilu ketika ada suatu perbaikan pada sistem saat di lapangan. Kemudian *kedua, Team verfak* team ini bertujuan untuk mempermudah penyelenggara pemilu saat verifikasi di lapangan agar berjalan dengan semestinya walaupun tidak seharusnya di bentuk team lapangan karena tidak mudah saat verifikasi faktual ke rumah masing-masing untuk mempersiapkan apa yang di butuhkan. Seperti yang diungkapkan Abd Muhlis Ketua DPD Partai Gelora Sampang:

“ kami mas, dari pengurus DPD Partai Gelora Kabupaten Sampang membuat team atau strategi yang mana untuk berkordinasi lebih mudah sehingga kami berusaha untuk membentuk team LO dan Team verfak agar mudah mendapatkan informasi dari penyelenggara pemilu dan persiapan di lapangan”⁸⁶

⁸⁶ Wawancara dengan abd muhlis di sekretariat partai Gelora Sampang, 5 januari 2023

D. Faktor yang penghambat dan pendukung partai Gelora Kabupaten Sampang lolos verifikasi peserta pemilu 2024

Partai Gelora adalah partai politik baru di Indonesia yang memiliki ciri khas partai religius, nasionalis dan kompetitif, dapat dilihat di atas strategi-strategi yang digunakan oleh partai Gelora Kabupaten Sampang lolos verifikasi sebagai peserta pemilu 2024.

Adapun faktor penghambat dan pendukung partai Gelora Kabupaten Sampang lolos verifikasi peserta pemilu 2024 ialah:

1. Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil penelitian penulis, ada beberapa faktor penghambat Partai Gelora Kabupaten Sampang lolos verifikasi peserta pemilu 2024, yaitu;

a) Faktor penghambat dalam komunikasi

Dalam komunikasi kita belajar bagaimana kita berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam berkomunikasi, hal tersebut menjadi faktor penghambat bagi kita Partai Gelora Kabupaten Sampang antara pengurus dan anggota tidak lain saat verifikasi faktual di rumah masing-masing karena sejauh ini partai Gelora Kabupaten Sampang berusaha untuk mengupayakan saat verifikasi faktual dilapangan. karena banyak hal menjadi penghambat saat di lapangan tidak hanya dalam komunikasi tetapi juga penghambat bagi partai baru ini salah satunya tidak ada orangnya. Tidak

hanya itu juga, faktor penghambat bagi partai Gelora Kabupaten Sampang tidak lain yaitu faktor Infastruktur dalam proses perjalanan di perdesaan tentu cukup memakan waktu sehinggah bisa di jadikan suatu penghambat bagi Pengurus DPD partai Gelora Kabupaten Sampang. Karena sejauh ini

“faktor penghambat pasti mas, dalam berkomunikasi kita juga sering yang namanya miskomunikasi jadi kita juga berusaha dalam komunikasi ke pengurus yang lain agar tidak ada yang namanya miskomunikasi dan lagi mas, kita menjadi faktor penghambat bagi kami yaitu tidak ada orangnya saat verifikasi. Penghambat lain mas tahu sendiri kalau sampang untuk wilayah desa sangat rusak jalanya mas jadi bisa dikatakan penghambat untuk waktu”⁸⁷

b) Faktor penghambat Dana

Sulitnya Partai Gelora Kabupaten Sampang dalam suatu kegiatan dilapangan baik dalam pelaksanaan sewa sekretariat maupun kegiatan- kegiatan lainnya ataupun saat verifikasi sehingga menjadi faktor utama bagi partai Gelora Kabupaten Sampang. Kerana sejauh ini parati Gelora tidak mempunyai anggaran ketikan verifikasi faktual, sewa sekretariat hingga program lainnya sehingga bisa dijadikan faktor penghambat bagi partai Gelora Kabupaten Sampang. Jika anggaran itu ada akan berjalan seperti kegiatan pada umumnya sehingga hanya berusaha dengan rasa semangat

⁸⁷ Wawancara dengan abd muhlis di sekretariat partai Gelora Sampang, 5 januari 2023

yang cukup. Dalam kegiatan pasti tidak terlepas yang namanya anggaran dana dalam suatu acara. Hal yang paling penting bagi partai Gelora Kabupaten Sampang dalam suatu partai politik ialah anggaran Dana. jadi ketika kita melakukan hal sesuatu pasti akan mengeluarkan dana tersebut.

“Dana ini mas, bagian penghambat banget mas di partai Gelora Kabupaten Sampang dana ini mas paling penting ketika melakukan sesuatu jadi mungkin saya berfikir masih partai baru. Tapi alhamdulillah rasa semangat temen-temen ketika ada hal kegiatan dalam pelaksanaan verifikasi tetap berjalan. Berkat berusaha temen-temen bisa ikhlas menjalankan semua ini walaupun hambatan yang cukup krusial”⁸⁸

c) Faktor penghambat pemilihan Sekretariat Partai Gelora Kabupaten Sampang.

“penghambat iya pasti ada mas, untuk penghambat kami di Partai gelora Kabupaten Sampang saat verifikasi faktual salah satunya tidak ada orangnya, jalanya rusak, sama juga pentuan sekretariat hal paling urgen Dana juga mas”⁸⁹

Adapun hasil wawancara terkait dengan kendala yang dihadapi pengurus dalam pemilihan lokasi Sekretariat DPD Partai Gelora Kabupaten Sampang terhadap di jalan antara lain:

“awalnya kami sedikit ragu dalam memilih lokasi ini sebagai tempat sekretariat DPD Partai Gelora Kabupaten Sampang karena saya terkendala dengan keuangan yang sedikit terutama biaya sewa ruko yang cukup mahal karena kami bisa menyewa tempat ini dapat hasil dari sumbangan, Selain itu melihat dari lahan parkir tidak

⁸⁸ Wawancara dengan abd muhlis di sekretariat partai Gelora Sampang, 5 januari 2023

⁸⁹ Wawancara dengan sahrul mukarrom di sekretariat partai Gelora Sampang, 6 januari 2023

terlalu luas sehingga di rasa kurang maksimal mengakibatkan keamanan di utamakan.”⁹⁰

Hasil wawancara dengan Bapak Sahrul Mukkarom Bendahara DPD Partai Gelora Kabupaten sampang mengenai kendala yang dihadapi pengurus dalam memilih lokasi sekretariat terhadap berjalannya perpolitikan, dia menemukan kendala sebelum memilih lokasi sekretariat DPD Partai Gelora walaupun niat awalnya itu sedikit ragu. Tetapi setelah melihat dari faktor tempat yang cukup strategis itu memotivasinya untuk tetap lanjut. Kendala yang ditemuinya adalah dalam persoalan keuangan terutama biaya sewa ruko, dan lokasi yang sempit sehingga kurang maksimal. Dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala yang mempengaruhi dalam pemilihan Sekretariat ini oleh pengurus DPD Partai Gelora Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

- 1) Kendala dalam keuangan, Kendala-kendala yang dihadapi pengurus dalam pemilihan Sekretariat DPD Partai Gelora Kabupaten Sampang berdasarkan analisis hasil wawancara terlihat ada beberapa yang ditemukan kendala yang berpengaruh dalam pemilihan Sekretariat DPD Partai Gelora Kabupaten Sampang yaitu:

⁹⁰ Wawancara dengan sahrul mukarrom di sekretariat partai Gelora Sampang, 6 januari 2023

- a. Kendala dalam keuangan terlihat kendala yang dihadapi dalam pemilihan lokasi sekretariat DPD Partai Gelora Kabupaten Sampang adalah kendala keuangan.
- b. Kendala sarana dan prasarana yang belum memadai. Terlihat kendala yang ditemui ketika pemilihan lokasi sekretariat DPD Partai Gelora Kabupaten Sampang disebabkan oleh kendala sarana dan prasarana yang belum memadai.
- c. Kendala sewa yang cukup besar terlihat kendala yang dihadapi ketika pemilihan lokasi sekretariat DPD Partai Gelora Kabupaten Sampang disebabkan oleh Kendala sewa yang cukup besar.
- d. Kendala infrastruktur Jalan disekitar lokasi sekretariat kurang memadai. Terlihat kendala yang dirasakan ketika pemilihan lokasi sekretariat DPD Partai Gelora Kabupaten Sampang yaitu kurangnya area parkir yang memadai.
- e. Kendala keamanan yang kurang memadai. Terlihat kendala yang dihadapi ketika pemilihan lokasi sekretariat DPD Partai Gelora Kabupaten

Sampang disebabkan oleh Kendala keamanan yang kurang memadai.

Berdasarkan hasil pemaparan di atas yang diteliti bahwa kendala terbanyak yang dihadapi ketika Pemilihan lokasi sekretariat DPD Partai Gelora Kabupaten Sampang yaitu Kendala keuangan dan biaya sewa dan Kendala sarana dan prasarana yang belum memadai. Sedangkan kendala terkecil yang ditemukan ketika pemilihan lokasi usaha sekretariat DPD Partai Gelora Kabupaten Sampang yaitu kendala area parkir dan Kendala keamanan yang kurang memadai.

2. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian penulis, ada beberapa faktor pendukung Partai Gelora Kabupaten Sampang supaya lolos verifikasi peserta pemilu 2024, yaitu:

a. Keterlibatan Tokoh-Tokoh Masyarakat

Partai Gelora adalah partai baru yang terbuka untuk menjunjung tinggi semangat dalam nilai nilai nasionalis. Sehingga baik tokoh setempat dan figur di Partai Gelora sendiri adalah satu kesatuan utuh dari gerak partai. Tokoh atau figur adalah gambaran dari partai, partai adalah cerminan dari tokoh atau figur yang tergabung didalamnya. Sehingga Partai Gelora sangat bergantung pada kriteria

dalam melakukan seleksi terhadap siapa saja yang kelak akan bergabung dalam partai baru ini. Bukan karena ketenaran dan kekayaannya, tapi apakah tokoh tersebut mampu dan mewujudkan cita-cita pendirian Partai Gelora tersebut.

Beberapa tokoh setempat yang bergabung dalam Partai Gelora Kabupaten Sampang untuk bagaimana partai baru ini bisa sejalan dengan nilai-nilai dalam semestinya karena adanya tokoh masyarakat setempat bisa semaksimal mungkin dalam memberikan arahan dan motivasi untuk masyarakat ataupun pemuda-pemuda di desa yang memang membutuhkan sesuatu nantinya, sehingga adanya tokoh masyarakat setempat ini memudahkan kita dalam berkomunikasi di kalangan bawah.

“ kami soal pendudung mas iya, tidak kekurangan kalau soal pendukung kita banyak baik dari kalangan muda, maupun tokoh setempat cuman kita ini terus terang tidak mempunyai tokoh agama yang betul betul kita komunikasi karena tokoh agama sudah banyak ke partai yang sudah lama jadi kita semaksimalnya saja untuk berkomunikasi dengan tokoh masyarakat setempat seperti halnya di kalangan desa mas”⁹¹

b. Pembentukan Tim-Tim lapangan

Dalam pembentukan tim khusus sangatlah berpengaruh dan penting bagi Partai Gelora Kabupaten

⁹¹ Wawancara dengan abd muhlis di sekretariat partai Gelora Sampang, 5 januari 2023

Sampang untuk membentuk tim-tim khusus dalam melakukan komunikasi di lapangan seperti halnya, bimbingan, dan pembinaan dalam suatu masalah di lapangan sehingga bisa mengetahui apa yang menjadi faktor kebutuhan masyarakat di bawah. Salah satunya adalah dengan adanya pembentukan tim khusus yang bergerak untuk mengurus dan menjaring seluruh kalangan bawah. Dengan demikian adanya tim-tim khusus menjadikan partai baru ini menjadi pilihan bagi masyarakat kabupaten Sampang. Adapun dalam pembentukan tersebut untuk mempermudah jejaring komunikasi ke bawah sehingga bisa dijadikan suatu pendukung bagi partai baru untuk memberikan arahan kepada masyarakat. meskipun partai baru ini telah membentuk tim khusus tujuan dalam hal tersebut tidak ada hal lain hanya ingin membimbing dalam kebutuhan masyarakat dengan adanya tim khusus bisa mengarahkan dan membimbing bagi kalangan bawah.

“adanya tim khusus tersebut sebenarnya tidak lain hanya untuk mempermudah komunikasi antara pengurus DPD dengan kalangan bawah sehingga bisa mengetahui apa yang di butuhkan oleh setempat mas, dan juga kita sebenarnya ingin juga setengah memberikan informasi bagaimana partai gelora kabupaten sampang memberikan yang terbaik bagi masyarakat setempat sehingga masyarakat berasumsi hal yang positif hadirnya partai baru ini”⁹²

⁹² Wawancara dengan ainul fakih di sekretariat partai Gelora Sampang, 12 januari 2023

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Strategi lolos verifikasi Partai Gelora Kabupaten Sampang meliputi: strategi lolos verifikasi pengurus, Strategi lolos verifikasi anggota dan strategi lolos verifikasi sekretariat; strategi lolos verifikasi pengurus Partai Gelora Kabupaten Sampang meliputi, strategi rekrutmen berbasis organisasi, persamaan visi–misi program perjuangan dan pertemanan. Strategi lolos verifikasi anggota Partai Gelora Kabupaten Sampang, Strategi ofensif meliputi: strategi gelya sunyi dan strategi media sosial dan strategi defensif meliputi: strategi komunikasi tatap muka (*Face to Face*), Strategi lolos verifikasi sekretariat Partai Gelora Kabupaten Sampang dengan mempertimbangkan tingkat kepadatan penduduk serta kedekatan jalan raya, kedekatan area perkantoran, keamanan lokasi, infastruktur serta saran dan prasana.
2. Faktor yang menjadi penghambat lolos verifikasi partai Gelora Kabupaten Sampang meliputi, fatktor dalam komunikasi dan faktor dana, faktor dalam pemilihan sekretaria. serta faktor yang pendukung Partai Gelora adanya tererlibatan tokoh-tokoh setempat masyarakat dan pembentukan tim-tim lapangan.

B. Saran

1. Terkait strategi Partai Gelora Kabupaten Sampang yang digunakan agar lolos verifikasi peserta pemilu 2024 melalui tahap demi tahap, di samping itu aspek lain yang juga perlu menjadi perhatian dalam perjalanan perpolitikan sesuai dengan visi, misi dan tujuan program.
2. Menyikapi mengenai sebagai Partai baru yakni Partai Gelora Kabupaten Sampang perlu menjaling hubungan komunikasi dengan baik secara internal dan external. Upaya membangun etika budaya dan politik.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Nfn,Efriza. 2019. “Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik [The Existence Of The Political Parties In Public Perception].” *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* Vol.10, No. 1.

Indra Madan, P, Ariany, R, Syahrizal. 2019. “Tata Kelola Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Komisi Pemilihan Umum kota Padang”. *JISPO*, Vol. 9, No.1.

Widyana Maulida, R. 2022. “Strategi Partai Gelora sebagai Partai Baru Menuju Pemilu 2024 Untuk Memenuhi Parliametary Threshold”. *Jurnal PolGov*, Vol. 4, No. 1.

Arsinaldi. 2019. “Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Dan Penguatan Prinsip Tata Kelola Pemilu Yang Berintegritas”. *Journal.kpu.go.id*.

Watoni, S, dewi Puspitarini, R. 2022. “Strategi Partai Politik Baru : Studi Kasus Strategi Partai Politik Jaring Dukungan Masyarakat Kota Probolinggo”. *Jurnal Inovasi*, Vol. 3, No.1.

Barokah, F, Maryanah, T, Darmasturi, A, Hertanto. 2022. “Disrupsi Politik: Peluang dan Tantangan Partai Politik Baru Jelang Pemilu 2024”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 21, No.1.

Ramadhan, D.A, 2019. “Menuju Penyerderhanaan Partai Politik di Indonesia serta Dampaknya Terhadap Persatuan Bangsa”. *Jurnal Administrative Law & Governance* ,Vol.2, No. 1.

Syafriandre, A, Zetra, A, Amsari Feri, 2019. “Malapraktik Dalam Proses Verifikasi Partai Politik Di Indonesia: Studi Pada Pemilihan Umum 2019”. *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 4, No. 1.

Dwi Putri, D, 2019. “Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Keadilan Dalam Hukum Islam”. *Jurnal Qiyas*, Vol. 4, No. 2.

Andyka Rizky, 2019. “Strategi Partai Garuda Pada Proses Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus DPD Partai Garuda Provinsi Aceh)”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol. -, No. 1-14.

Putra,F, Zarkasi, A, 2020. ” Peran Bawaslu Provinsi Jambi Dalam Verifikasi Partai Politik Pemilu Tahun 2019”. *Jurnal Trias Politika*, Vol 4, No.2.

IvaniarRendy, 2013. “Efektifitas Sistem Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Mewujudkan Sistem Multi Partai Sederhana”. *Jurnal Hukum tata negara*.

Setiawan, I, 2022. “Desain Pemilu Multi Partai Sederhana (Kritik Terhadap Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik).”*Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, Vol. 8, No. 2.

Gelora Mahardika, A, 2020. ”Rekonstruksi Verifikasi Partai Politik Sebagai Penegakan Asas Efisiensi Dan Efektivitas Pemilihan Umum”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 2.

Wibowo Trisakson, H, 2019. “Verifikasi Faktual Parpol Dalam Perspektif Justice As Fairness Hery Wibowo Trisakson”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No.2.

Kurniawan, F,Sari Handayani, R, 2022. “Evaluasi Mekanisme Pendaftaran Dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019”.*Jurnal Kebijakan Publik*, Vol.13, No.1.

Hoffman, R, 2019. “Pelaksanaan Verifikasi Terhadap Syarat Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019”. *Jurnal Perahu*, Vol. 7, No. 2.

Fadli Sultan, W, Sukri, Yunus, A, 2022. “Perbandingan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2019 dan 2024”. *Jurnal of Social Religion Research*, Vol.7, No. 2.

Lestari Dina, 2019. “Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Di Sampang Tahun 2018”. *Jurnal Politik Indonesia* Vol.05 No.02.

Buku

Firmanzah, 2008. *Mengelola Partai Politik-Edisi Revisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.

Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.

Peter Schroder, 2006. *Strategi Politik*. Jakarta: FNF Indonesia.

Arifin, Anwar. 2006. *Pencitraan dalam politik strategi kemenangan pemilu dalam prespektif komunikasi politik*. Jakarta: Pustaka Indonesia.

Moleong J., Lexy . 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya.

- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Bungin Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Fajar Interpratama Offset.
- Nugrahani Farida, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif (dalam Penelitian Pendidikan Bahasa)*. Surakarta; Cakra Books.
- Basuki, *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- A. Muri Yusuf, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Nazir, 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press.
- Burhan Bungin, 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Budiarjo, Miriam. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Budiarjo, Miriam. 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Cetakan 22). Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Nomer 4 tahun 2022 tentang *Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah*.
- Afan, Gaffar. 2002. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Ichlasus, Amal. 1996. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Pramono, Agus. 2005. *Elite Politik yang Loyo, dan Harapan Masa Depan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Stephen W , Karen A.Foss. 2009. *Teori Komunikasi, edisi 9*. Jakarta: Salemba Humanika.

Thomas Luckmann, Peter, Berger. 2013. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Sebuah Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES.

Burhan, Bungin. 2007. *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana.

Nursal, Adman. 2004. *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Peraturan Per-Undang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia No.7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Website

<https://www.kpu.go.id>

<https://www.kab-sampang.kpu.go.id/>

<https://www.partaigelora.id>

<https://maduraindepth.com/ini-45-nama-anggota-dprd-terpilih-periode-2019-2024>
diakses pada tanggal 26 maret 2023